

**DAKWAH KEBANGSAAN AHMAD SYAFI'I MAARIF DI
INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Oleh :

Ahmad Science Nidaus Salam

111211018

**KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan
sebagaimana mestinya terhadap naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Ahmad Science Nidaus Salam
NIM : 111211018
Fak/Jur : Dakwah dan Komunikasi/KPI
Judul : **Dakwah Kebangsaan Ahmad Syafi'i Maarif di
Indonesia**

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh
karenanya mohon agar segera diujikan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

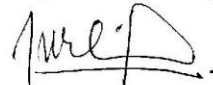
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juli 2018

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi dan tata Tulis



Dr. H. Najahat Musyafak, M.A.

Dra. Hj. Amelia Rahmi, M.Pd.

NIP. 19701020 199503 1 001

NIP. 19660209 199303 2 003

SKRIPSI
**DAKWAH KEBANGSAAN AHMAD SYAFI' MAARIF DI
INDONESIA**

Disusun Oleh:
Ahmad Science Nidaus Salam
111211018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 18 Juli 2018 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Dr. H. Najahan Musyafak, M.A.
NIP. 19701020 199503 1 001

Penguji II

Dr. Hj. Siti Sholihati, M.A.
NIP. 19631017 199103 2 001

Penguji III

Nur Cahyo Hendro Wibowo, S.T., Kom.
NIP. 19731222 200604 1 001

Penguji IV

Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag.
NIP. 19660513 199303 1 002

Mengetahui

Pembimbing I

Dr. H. Najahan Musyafak, M.A.
NIP. 19701020 199503 1 001

Pembimbing II

Dra. Hj. Amelia Rahmi, M.Pd.
NIP. 19660209 199303 2 003

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada Tanggal,



Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag.
NIP. 19610727 200003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juli 2018


da Tangan,

Caus Salam
NIM: 111271018

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur tak terhitung peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan rahmat yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada sang suri tauladan Muhammad SAW, segenap keluarganya, beserta para sahabat.

Setelah melalui beberapa proses yang tak sebentar, akhirnya skripsi berjudul “Dakwah Kebangsaan Ahmad Syafi'i Maarif di Indonesia” telah selesai. Banyak keragu-raguan yang turut menemani perjalanan peneliti menyelesaikan penelitian ini. Terlepas dari segala keraguan, peneliti mengakui telah melibatkan bantuan banyak pihak dalam proses pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, MA, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Awaluddin Pimay, Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Hj. Siti Solikhati, M.A, selaku Ketua Jurusan KPI yang dedikasinya untuk jurusan patut diteladani.
4. Dr. H. Najahan Musyafak, M.A. sebagai dosen pembimbing bidang metodologi penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing peneliti selama mengerjakan skripsi.
5. Dra. Hj. Amelia Rahmi, M.Pd, selaku dosen pembimbing bidang substansi sekaligus sebagai wali studi yang sudah seperti orang tua di universitas selama ini. Terima kasih senantiasa memberi motivasi dan semangat agar peneliti selalu belajar dan berusaha.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mendidik peneliti dalam berbagai aspek keilmuan dan keperluan administrasi.

7. Alm. Ayahanda Zaenal Arifin Salam dan Ibunda Siti Rusmiana tiada kata yang bisa mengungkapkan semua pengorbanan dan doa yang selalu menyertai peneliti. Najah Shufi Adzkiaus Salam dan Nizar Nobel Afkarus Salam menjadi penyemangat peneliti.
8. Keluarga di Banyumanik yang senantiasa membantu peneliti dalam berproses di universitas.
9. Best partner, Zakia yang senantiasa ada di setiap waktu dan memberi support baik moril maupun materiil.
10. Adik-adikku, Sa'i, Dian, Etik, Baihaqi, Rusli, Aan dan Imam yang selalu memberi dorongan kepada peneliti.
11. Sahabat seperjuangan angkatan 2011, Fuad, Muntaha, Isna, Lestri dan kawan-kawan.
12. Keluarga PMII cabang kota Semarang sebagai tempat berproses peneliti.
13. Segenap keluarga besar PMII Rayon Dakwah yang menjadi rumah serta tempat peneliti belajar menempa diri dalam nuansa kebersamaan.
14. Departemen Rumah Ide yang menjadi wadah penenliti dalam berproses.
15. Keluarga besar Senat Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat terbuka untuk menerima kritik, saran, dan masukan demi kebaikan penelitian ini. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Semarang, Juli 2018

Ahmad Science Nidaus Salam

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada peneliti menyelesaikan karya ini. Dengan segala ketulusan hati skripsi ini kupersembahkan teruntuk:

- ❖ Almamaterku tercinta, Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo
- ❖ Kedua orang tua peneliti tersayang, Alm. Ayahanda Zaenal Arifin Salam dan Ibunda Siti Rusmiana yang tak kenal lelah mendoakan peneliti.
- ❖ Best Partner segala bidang peneliti yang senantiasa ada di setiap waktu dan memberi support baik moriil maupun materiil,
- ❖ Sahabat-sahabat dan lingkungan sekitar peneliti yang selalu memberi dukungan kepada peneliti.

MOTTO

Berjuang sampai akhir atau tidak sama sekali.

(Ahmad Science Nidaus Salam)

Abstrak

Para pendiri negeri ini benar-benar memahami bahwa antara agama dan negara bukanlah sesuatu yang harus saling dihadapkan, melainkan satu kombinasi indah yang sepatutnya didesain sedemikian rupa agar bisa berjalan seiring guna mewujudkan cita-cita bersama di tengah keberagaman. Tetapi bencana bisa saja terjadi bila pemeluk agama kehilangan daya nalar, kemudian menghakimi semua orang yang tidak sefaham dengan aliran pemikiran mereka yang monolitik. Contoh dalam berbagai peradaban umat manusia tentang monopoli kebenaran ini tidak sulit dicari. darah pun sudah banyak tertumpah akibat penghakiman segolongan orang terhadap pihak lain karena perbedaan penafsiran agama atau ideologi. Salah satu tokoh yang kemudian menyadari hal itu untuk kemudian terus bergerak melalui gagasan dan aktifitas dakwah kebangsaannya adalah Ahmad Syafi'i Maarif.

Menggunakan metode penelitian berjenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi tokoh, penelitian ini dilakukan untuk menjawab tentang bagaimana dakwah kebangsaan Ahmad Syafii Maarif di Indonesia.

Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Ahmad Syafi'i Maarif dalam melakukan dakwah kebangsaan di dasari dengan tiga hal, yakni berpijak pada konsep negara berkeadilan bukan negara Islam, mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, serta menolak dengan keras politik identitas. *Kedua*, Aktivitas dakwah kebangsaan Ahmad Syafi'i Maarif di Indonesia berdasar pada hidupnya sebagai bapak bangsa, sebagai tokoh pluralis yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemajuan dalam bingkai keislaman, ke-Indonesiaan dan kemanusiaan, ia sebagai intelektual muslim yang merasa memiliki tanggungjawab untuk memperjuangkan Islam moderat di Indonesia.

Dakwah kebangsaan Ahmad Syafii Maarif di Indonesia sangat relevan untuk kondisi umat Islam saat ini. Dengan model kontekstualisasi ajaran Islam menuju kepada konsepsi riil (kontekstual) memecahkan problematika umat yang kian hari kian kompleks mulai dari problematika pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya bahkan sekarang dengan terbukanya ekspresi keberagaman.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber dan Jenis Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Teknik Analisa Data	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
 BAB II DAKWAH KEBANGSAAN	
A. Dakwah Kebangsaan.....	16

1. Dakwah.....	16
2. Kebangsaan (Nasionalisme).....	18
3. Dakwah Kebangsaan di Indonesia	20

BAB III DAKWAH KEBANGSAAN SYAFI'I MAARIF DI INDONESIA

A. Biografi Ahmad Syafii Maarif.....	22
B. Pandangan Ahmad Syafi'i Maarif terkait Islam dan Negara....	27
1. Negara berkeadilan bukan Negara Islam	30
2. Pancasila Dasar Negara	34
3. Menolak Politik Identitas	36
C. Aktivitas Dakwah Kebangsaan Ahmad Syafi'i Maarif di Indonesia.....	44

BAB IV ANALISIS DAKWAH KEBANGSAAN AHMAD SYAFI'I MAARIF DI INDONESIA

A. Analisis Pandangan Ahmad Syafi'i Maarif Terkait Islam dan Negara.....	43
1. Negara berkeadilan bukan Negara Islam	43
2. Pancasila Dasar Negara	47
3. Menolak Politik Identitas	52
4. Aktualisasi Dakwah Kebangsaan di Era Saat ini (Perspektif Paradigma Dakwah)	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satu dari beberapa hal yang bisa diidentifikasi sebagai sebuah pondasi atas tercapai dan bertahannya kemerdekaan bangsa ini adalah kemampuan bangsa Indonesia dalam menyelaraskan urusan kebangsaan dan keagamaan dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pondasi yang kuat akan menjamin tegaknya negara. Para pendiri negeri ini benar-benar memahami bahwa antara agama dan negara bukanlah sesuatu yang harus saling dihadapkan, melainkan satu kombinasi indah yang sepatutnya didesain sedemikian rupa agar bisa berjalan seiring guna mewujudkan cita-cita bersama di tengah keberagaman.

Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas, merupakan agama yang di dalamnya mengajarkan kesungguhan menjalankan syari'at Islam, melaksanakan organisasi dan cita-cita negara. Karakteristik ajaran Islam bersifat terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Islam sebagai sebuah ajaran *Illahiyah* yang berisi tata nilai kehidupan hanya akan menjadi sebuah konsep yang melangit jika tersinari oleh cahaya keislaman (Rahmat, 2002: 1). Oleh Sebab itu tidak salah jika kemudian dengan tangan terbuka mayoritas muslimin -utamanya diwakili para ulama- menerima Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebenarnya dari segi jumlah tidak ada yang harus dirisaukan tentang masa depan Islam di Indonesia. Sebab mayoritas masyarakat muslim yang telah terwadahi dalam dua sayap besar Islam, NU dan Muhammadiyah sudah sejak awal bekerja keras untuk mengembangkan sebuah Islam yang ramah terhadap siapa saja, bahkan terhadap kaum tidak beriman sekalipun, selama semua pihak saling menghormati perbedaan pandangan. Tetapi bencana bisa saja terjadi bila pemeluk agama kehilangan daya nalar, kemudian menghakimi semua orang yang tidak sefaham dengan aliran pemikiran mereka yang monolitik. Contoh dalam berbagai peradaban umat manusia tentang monopoli

kebenaran ini tidak sulit dicari. darah pun sudah banyak tertumpah akibat penghakiman segolongan orang terhadap pihak lain karena perbedaan penafsiran agama atau ideologi (Maarif, dkk, 2009: 7).

Hanya saja akhir-akhir ini mulai muncul tanda-tanda yang disebut Maarif itu sebagai ‘bencana’ di Negeri ini. Dewasa ini sebagian kaum muslim yang ingin merubah pandangan itu menjadi sebuah prinsip bahwa Islam harus dijadikan dasar Negara (bersikukuh ingin mendirikan Negara Islam di Indonesia). Hal ini bisa dilihat dari survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Minggu (4/6/2017) dikemukakan bahwa sebanyak 9,2 persen responden yang setuju NKRI diganti menjadi negara khilafah atau negara Islam. Adapun 79,3 persen responden menyatakan bahwa NKRI adalah yang terbaik bagi Indonesia. Sementara 11,5 persen lainnya responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab. Kendati demikian, Saiful Mujani mengatakan, sebanyak 9,2 persen warga yang ingin NKRI berubah menjadi negara khilafah memang bukan lah jumlah yang sedikit. "Jumlahnya bisa sampai 20 juta penduduk, lebih banyak dari warga Singapura," kata Saiful saat menyampaikan hasil surveinya (kompas.com, diakses pada 18 Agustus 2017). Bagi mereka yang setuju akan khilafah memiliki doktrin yang berpandangan bahwa demokrasi adalah sistem kufur, yang bertentangan dengan Islam. Bagi mereka Islam hanya mengenal Tuhan sebagai pembuat hukum, bukan manusia dengan segala keterbatasannya (Lubis dan Jamu'in, 2015: 163).

Kemudian dalam merespon munculnya fenomena menguatnya kembali gerakan ataupun ideologi yang anti NKRI dan Pancasila, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat untuk mendiskusikan metode dakwah kebangsaan yang efektif, dengan tema “Metode Dakwah Kebangsaan: Harmoni antara Agama dan Negara” yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 di Gedung MUI Pusat.

Kesimpulan diskusi tersebut adalah, agar metode dakwah dapat membangun nasionalisme, maka semua pihak harus kembali kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang telah menegaskan tentang mengukuhkan NKRI

adalah ijtihad yang sudah final sebagai implementasi Islam Rahmatan Lil'alamin. Ulama telah memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab menurut Islam, model dan bentuk negara adalah masalah ijtihadiyah (olah pikir manusia), bahwa yang terpenting adalah terciptanya kedamaian, keadilan dan kesejahteraan (Kumparan.com, berita 17 Mei 2017, diakses 12 Juli 2018).

Karena itu, sudah sepatutnya energi umat Islam lebih diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi umat, karena perdebatan ideologi negara yang berkepanjangan hanya menyita waktu umat Islam. Padahal, NKRI dan Pancasila sangat adaptif terhadap ajaran Islam. Pengusungan ideologi yang bertentangan dengan NKRI dan Pancasila hanya akan mengundang kontroversi berkepanjangan, sungguhpun mengatasnamakan ajaran Islam, seperti paham yang mengusung khilafah.

Fakta di atas seharusnya membuat masyarakat kembali belajar kepada para guru bangsa dan ulama di Negeri ini yang telah bertekad bulat menjaga keutuhan NKRI dengan tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman yang seyogyanya dipraktikkan oleh para pemeluknya. Kondisi Negara yang semacam ini bagi kaum muslim seharusnya memunculkan respon cepat dengan melakukan dakwah kebangsaan agar keseimbangan antara bangsa dan agama bisa berjalan tanpa dinodai oleh mereka yang memiliki tendensi monolitik dalam urusan 'kebenaran'.

Muhammadiyah, dalam konteks ini memandang Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dengan ketaatan beribadah dan toleransi yang tinggi. Tradisi toleransi mengakar kuat dalam sikap dan perilaku saling menghormati dan bekerjasama di antara pemeluk agama yang berbeda. Namun akhir-akhir ini terdapat gejala melemahnya budaya toleransi di Indonesia yang ditandai oleh menguatnya ekstrimisme di hampir semua kelompok seperti tindakan penyerangan tempat ibadah dan kekerasan atas nama agama yang seringkali terjadi di sejumlah tempat. Selain karena faktor penegakan hukum yang lemah dan kondisi sosial yang rawan, tumbuhnya ekstrimisme keagamaan juga disebabkan oleh memudarnya budaya toleransi. Oleh karena itu

diperlakukan usaha komprehensif dari Pemerintah dan kekuatan masyarakat madani untuk memperkuat budaya toleransi sebagai bagian dari karakter masyarakat Indonesia. Usaha memperkuat toleransi tidak cukup dengan memperbanyak aturan formal yang kaku, tetapi menyemai dan menumbuhkan kembali nilai-nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan agama berbasis keluarga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan formal disertai keteladanan para tokoh agama dan elite bangsa (PP Muhammadiyah, 2015: 6).

Sama halnya dengan NU sebagai naungan organisasional bagi perjuangan ulama-ulama pesantren yang didirikan pada 31 Januari 1926 juga memiliki konsentrasi terhadap menjaga dakwah kebangsaan. Dakwah kebangsaan merupakan dakwah yang dikontekstualkan dan disinergiskan dalam nilai-nilai ke-Indonesiaan sebagai *problem solving* untuk menjawab tantangan dan hajat umat demi keberlangsungan generasi bangsa. Hal tersebut juga harus diimbangi dengan kesadaran kebangsaan masyarakat beragama.

Kesadaran kebangsaan ini bisa terbentuk, karena kami memahami Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Artinya, karena rahmat Islam tidak hanya untuk umat muslim, maka perjuangan Islam bisa diperluas ke dalam konteks kebangsaan yang tentunya melampaui sekat-sekat keagamaan. Nahdlatul Ulama (NU), secara prinsipil memang memahami Islam terutama sebagai rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*). Artinya, Islam ketika dilaksanakan secara benar, akan mendatangkan rahmat, baik untuk orang Islam maupun bagi seluruh alam. Islam sebagai agama penyempurna tidak hanya membatasi kebaikannya, murni untuk umat Islam semata, melainkan untuk semesta alam, baik seluruh manusia, makhluk dan kehidupan itu sendiri. Kesempurnaan Islam terletak di dalam kesemestaan ini, yang akhirnya tidak membatasi dirinya dalam klaim kelompok, klaim golongan, apalagi klaim pribadi (Ulum, 2012: 167).

Ahmad Syafii Maarif memandang bahwa pola hubungan antara negara dan agama tergambar dalam pola yang saling memerlukan, Negara memerlukan agama sebagai sumber prinsip moral-transendental bagi tegaknya keadilan dan prinsip persamaan dalam sebuah negara, sedangkan agama butuh

negara sebagai institusi pelindung bagi terlaksananya ajaran moral agama dapat tertanam dalam kehidupan sehari-hari (Solikin, 2012: 194). Maka tidak salah jika kemudian ia merupakan satu dari banyak tokoh yang benar-benar *concern* dalam memperjuangkan keutuhan NKRI melalui dakwah kebangsaan yang dilakukannya.

Sebagai pelaksanaan amanat Muktamar Muhammadiyah ke-46, Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama dengan organisasi masyarakat madani dan para tokoh bangsa telah melakukan judicial review sejumlah undang-undang yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi rakyat Indonesia dan mengancam kedaulatan negara. Langkah strategis tersebut bagi Muhammadiyah merupakan wujud Jihad Konstitusi untuk penyelamatan Indonesia dan masa depan generasi bangsa, sebagai bagian tidak terpisahkan dari dakwah pencerahan menuju Indonesia berkemajuan. (PP Muhammadiyah, 2015: 13).

Prestasi akademik dan non-akademik itu telah menjadikan Buya Syafii, demikian ia akrab dipanggil, sebagai Guru Bangsa yang memiliki kontribusi besar pada pencitraan Islam Indonesia. Isu-isu penting yang berkaitan dengan Islam dicetuskan dengan bahasa yang lugas, kritis dan tentu dalam bahasa yang indah dan puitis. awasannya sangat luas, hal ini nampak pada *concern* pemikirannya mulai soal nasional hingga global, seperti; sejarah, agama, kebudayaan, pemikiran, politik, dan dunia Muslim. Tema-tema tersebut mengindikasikan bahwa si ‘anak panah’ Muhammadiyah ini memiliki kepekaan yang tinggi pada lingkungan sosialnya. Dengan berbekal sebagai empu dalam bidang sejarah, maka modalitas ini mengantarkannya menjadi sosok intelektual yang tulus dan berani mengungkap fakta-fakta sejarah yang mengingkari nilai-nilai kemanusiaan meskipun terkadang harus berhadapan dengan tembok opini *mainstream* yang terlanjur membatu (Damanhuri, 2015: 76-77). Oleh karenanya hal tersebut menjadi penegas bahwa dakwah kebangsaan yang dilakukan oleh Syafii Maarif adalah sebuah jawaban atas berbagai realitas munculnya faham monolitik di Negeri ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dakwah kebangsaan Ahmad Syafii Maarif?
2. Bagaimana relevansi dakwah kebangsaan Ahmad Syafi'i Maarif dalam konteks umat Islam Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Memaparkan konsep dakwah kebangsaan Ahmad Syafii Maarif.
2. Mengetahui relevansi dakwah kebangsaan Ahmad Syafi'i Maarif dalam konteks umat Islam Indonesia untuk saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan praktis. Adapun secara rinci dipaparkan sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoretik dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu tentang agama Islam yang damai dan sesuai dengan prinsip Pancasila yang telah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa.
2. Manfaat secara praktis, untuk menambah pemahaman terhadap dakwah Ahmad Syafii Maarif guna menambah referensi dalam usaha pengembangan dakwah di Indonesia. diharapkan dengan melihat dakwah Ahmad Syafiri Maarif mampu dijadikan contoh perihal menyikapi posisi umat Islam sebagai masyarakat mayoritas yang hidup di tengah kemajemukan bangsa ini.

E. Tinjauan Pustaka

Agar tidak terjadi kesamaan dalam proses penulisan terhadap penelitian yang sebelumnya, maka peneliti akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan judul tersebut di atas, antara lain:

1. Skripsi Hamithan Ariadi (2010) Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul "Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif Mengenai Demokrasi di Indonesia". Penelitian ini dilandasi sebuah pemikiran bahwa Ahmad Syafi'i Ma'arif sebagai tokoh intelektual muslim yang telah ikut memberi angin segar bagi tumbuhnya dan berkembangnya demokrasi di Indonesia. Beranjak dari alasan di atas, penulis tertarik mengemukakan hal tersebut dengan fokus permasalahan, bagaimana pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif mengenai demokrasi di Indonesia. Sehingga tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif mengenai demokrasi di Indonesia.

Penelitian tersebut berbentuk penelitian pustaka, yang berupa kajian sejumlah literatur yang berkenaan dengan fokus permasalahan. Data dikumpulkan melalui teknik survei kepustakaan dan studi literatur. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui teknik editing, klasifikasi dan interpestasi data, selanjutnya diuraikan dan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari penelaahan yang diuraikan, dapat diketahui demokrasi menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif demokrasi yang pernah ada di Indonesia, dapat dipilah dalam tiga kategori. Pertama, demokrasi penguasa. Kedua, demokrasi elit Ketiga, demokrasi rakyat. Demokrasi konteks Indonesia, Ahmad Syafi'i Ma'arif mengaitkannya dengan sila keempat pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam sila keempat mengacu pada sistem politik demokrasi, meski secara eksplisit tidak tercantum. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Parameter tersebut menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif meliputi empat aspek yaitu: 1) Masalah pembentukan negara.2).Dasar kekuasaan negara. 3) Susunan kekuasaan negara. 4) Kontrol rakyat. Wacana Ahmad Syafi'i Ma'arif tentang prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia sebagai berikut, yaitu: Adanya pembagian kekuasaan, Peradilan yang bebas, Pengakuan hak minoritas, Pers yang bebas, Beberapa partai politik, Konsesus, Persetujuan, Pemerintah yang konstitusional (berdasarkan hukum dasar), Perlindungan Hak Asasi, Mekanisme politik, dan Kebebasan kebijaksanaan Negara, Serta Pemerintah yang mengutamakan musyawarah.

2. Penelitian Ahmad Sholikin (2012) yang berjudul "Pemikiran Politik Negara Dan Agama Ahmad Syafii Maarif". Penelitian tersebut membahas tentang pemikiran politik Negara dan Agama Ahmad Syafii Maarif, serta latar belakang pemikiran tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan data pustaka sebagai sumber utama penelitian ini. Dalam menganalisa pemikiran Ahmad Syafii Maarif, Ahmad Solikin

menggunakan teori politik Islam Al-Maududi, serta sosiologi pengetahuan Karl Manheim untuk menganalisa latar belakang pemikiran tersebut. Hasil penelitian tersebut adalah, *pertama*, Ahmad Syafii Maarif adalah seorang intelektual Muslim yang menggunakan semangat moral Islam sebagai dasar berpijak dari seluruh pemikiran politiknya. Pola hubungan antara Negara dan Agama tergambar dalam pola yang saling memerlukan, Negara memerlukan Agama sebagai sumber prinsip moral-transendental bagi tegaknya keadilan dan prinsip persamaan dalam sebuah Negara, sedangkan Agama butuh Negara sebagai institusi pelindung bagi terlaksananya ajaran moral Agama dapat tertanam dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*, Ahmad Syafii Maarif dalam hal pemikiran negara dan agama mengalami transformasi pemikiran yang sangat kontras, dari syariat oriented pemikiran Moh. Natsir sebelum menjadi seorang sosial- demokrat yang menjadi orientasi dari Muhammad Hatta. Titik kontras pemikirannya adalah sebelum Chicago dan pasca Chicago.

3. Penelitian Damanhuri (2015) yang berjudul Islam, Keindonesiaan, dan Kemanusiaan (Telaah Pemikiran Ahmad Syafii Maarif). Pada penelitian tersebut ia mencoba memaparkan pemikiran keislaman Ahmad Syafii Maarif menempati ruang tersendiri dalam kancah pemikiran Islam Indonesia. Bagi Damanhuri Ahmad Syafii Maarif berusaha memperkenalkan wajah Islam yang ramah, damai, toleran, kritis dan dinamis yang diderivasi dari pemahaman yang utuh terhadap pesan moral dan nilai-nilai universal al-Quran dan Sunnah Nabi. Syafii Maarif bukanlah seorang intelektual di menara gading karena ia telah menjadi bagian penting dari dinamika Muhammadiyah. Menurutnya, berkiprah dalam ormas Islam semacam Muhammadiyah menuntut kesabaran tingkat tinggi. Dalam konteks ini, ungkapan “Satu Kata, Satu Perbuatan” mencerminkan sebuah konsistensi intelektual dirinya yang dipengaruhi filosofi Iqbalian; filosofi yang menanamkan semangat kenabian di mana kesadaran langit (idealisme-Qurani) harus berjumbuh dengan fakta-fakta kesejarahan bumi (realitas).

Walaupun dikatakan sebagai pemikir agak terlambat (*the late comer*) munculnya dalam pentas tokoh Islam Indonesia, namun keberadaannya kini menjadi penting ketika tokoh-tokoh Islam yang dimiliki bangsa semakin ‘menghilang’ karena concern dan fokus perjuangannya telah bergeser pada wilayah yang pragmatis-politis. Dengan konsistensi yang dimiliki, maka layaklah intelektual dari ranah Minangkabau ini menjadi Guru Bangsa yang senantiasa kritis dan peka terhadap persoalan umat. Ikhtiar membangun Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan dalam satu tarikan napas merupakan kerja dakwah dan kebudayaan yang diharapkan berdaya jangkau jauh.

4. Skripsi Fajrul Amalia Arrohmawati (2017) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Pemikiran Pendidikan Pluralisme Keagamaan Ahmad Syafii Maarif”. Penelitian tersebut mencoba menggali pemikiran salah satu tokoh yang merumuskan ide toleransi antar umat beragama, yaitu Ahmad Syafii Maarif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pemikiran pendidikan pluralisme keagamaan menurut Ahmad Syafii Maarif, serta implikasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis kepustakaan dan dengan pendekatan historis. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, serta analisis datanya adalah dengan metode *content analysis*.

Dengan kerangka itu, dapat diketahui bahwa prinsip kejujuran, keikhlasan, lapang dada serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sangat diperlukan dalam melangsungkan pendidikan pluralisme keagamaan. Selanjutnya, diperlukan sikap kepatuhan terhadap konstitusi dalam rangka merawat keberagaman serta menghindari sikap fanatisme sempit. Implikasi Pendidikan pluralisme keagamaan Ahmad Syafii Maarif mencakup dua sisi. Dalam sisi internal, tema moralitas dan toleransi menjadi misi yang selalu ia bawa, Pada sisi eksternal, melalui buah pikiran yang langsung beliau tuangkan dan lembaga Maarif Institute yang ia

dirikan, ide pluralisme yang terus ia gaungkan kian dikenal dan tersebar luas ke dalam alam pikiran masyarakat Indonesia.

5. Eko Sumadi (2016) yang berjudul “Keislaman dan Kebangsaan: Modal Dasar Pengembangan Organisasi Dakwah”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa; pada wilayah penafsiran sangat mungkin lahir berbagai perbedaan (*khilafiyah*), maka hal demikian harus senantiasa menjadi kesadaran setiap aktivis ormas Islam di Indonesia. Dengan demikian dakwah kebangsaan harus didasarkan pada sikap toleransi dan sikap menghargai setiap perbedaan harus dijunjung tinggi. Karena dalam wilayah panafsiran tidak ada kebenaran yang mutlak, yang ada hanyalah kebenaran relatif.

Selain sikap toleransi, setiap aktivis ormas Islam di Indonesia juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang komprehensif dan senantiasa mengedepankan sikap nasionalisme. Harus ada kesadaran bahwa Indonesia bukan Negara Agama, bukan juga Negara sekuler melainkan Negara religius. Sehingga rumusan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan suatu dasar yang sudah final. Selanjutnya segala sikap dan tindakan yang bertentangan dengan 4 pilar kebangsaan tersebut harus di jauhi dan ditinggalkan.

Melihat kelima penelitian di atas, terdapat beberapa kesamaan antara kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Sisi kesamaan utamanya terdapat pada objek kajian yang mana dari keempat penelitian di atas juga figure Ahmad Syafii Maarif sebagai objek kajian. Adanya kesamaan dalam kajian, tentu membantu serta memberi pijakan bagi peneliti dalam menentukan arah penelitian yang dilakukan, terkait kajian utama yakni, dakwah kebangsaan yang dilakukan oleh Ahmad Syafii Maarif.

Meski demikian, ada sisi-sisi berbeda dari apa yang akan diambil oleh peneliti, untuk menentukan hasil akhir penelitian. Berbeda dengan penelitian Hamithan Ariadi misalnya, ia lebih membidik pada kajian pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Demokrasi di Indonesia, sehingga aspek politik menjadi

kajian yang paling nampak pada penelitian tersebut. Begitu pula dengan Ahmad Solikin, yang juga meletakkan analisis berdasarkan teori politik Islam Al Maududi sebagai pondasi untuk menganalisa pemikiran negara dan agama Ahmad Syafii Maarif juga memiliki kajian fokus pada sisi politik. Adapun Damanhuri mencoba menggali sosok Ahmad Syafii Maarif dalam memperkenalkan wajah Islam yang ramah, damai, toleran, kritis dan dinamis yang diderivasi dari pemahaman yang utuh terhadap pesan moral dan nilai-nilai universal al-Quran dan Sunnah Nabi. Penelitian tersebut memiliki titik tumpu pada ketokohan Syafii Maarif dan juga toleransi yang berusaha disebarkannya. Hal yang sama pun juga dilakukan oleh Fajrul Amalia Arrohmawati yang cenderung fokus pada aspek toleransi beragama yang diperjuangkan oleh Ahmad Syafii Maarif. Sementara apa yang menjadi fokus kajian daripada penelitian ini adalah spesifik pada dakwah kebangsaan yang dilakukan oleh Ahmad Syafii Maarif dalam konteks keindonesiaan. Atas dasar itu, maka peneliti menganggap penelitian ini memiliki aspek kelayakan untuk menjadikan kajian ini dilanjutkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian, Pendekatan dan Spesifikasi penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kalimat yang tidak disandarkan pada hitung-hitungan statistic. Hal ini merujuk pendapat Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan (Moleong, 2004: 3). Penelitian ini menggunakan riset kepustakaan (*library research*) yang bersifat literer, yakni sumber-sumber digali dari bahan-bahan yang relevan terkait dengan topik yang dibahas melalui buku-buku dan bahan-bahan pustaka.

Library research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian terhadap sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, majalah dan lain-lain untuk

menggali gagasan atau pemikiran baru sebagai bahan dasar melakukan deduksi dari pengetahuan yang sudah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan (Setiyowati, 2013: 22).

2. Definisi Konseptual

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan untuk menggali perihal dakwah kebangsaan Ahmad Syafi'i Maarif di Indonesia. Artinya fokus penelitian ini terletak pada aktivitas dakwah tokoh tersebut sebagai sebuah jawaban atas realitas sosial keagamaan saat ini. Utamanya tentang realitas adanya kesalahpahaman yang mendikotomikan nasionalisme dan dakwah yang sebenarnya sangat berkaitan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari tolak ukur kebenaran akademik yang berlandaskan pada data-data yang valid, serta berbagai literatur yang sesuai.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Ada pun sumber data primer yang kami gunakan adalah karya-karya Ahmad Syafii Maarif serta berbagai pemberitaan berbagai media (di antaranya Media Indonesia dan Tempo.co) untuk mengetahui perihal aktifitas dakwah kebangsaan yang dilakukan olehnya di negeri ini. Sementara sumber sekunder didapat dari berbagai pendapat tokoh tentang Ahmad Syafii Maarif baik itu didapat dari wawancara di media massa (online, cetak serta televisi) maupun melalui karya-karya ilmiah (buku maupun jurnal) yang menyoroti tentang kehidupan dan dakwah kebangsaan yang dilakukannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan cara dokumentasi. Dokumentasi yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan prasasti (Arikunto, 1993: 102). Dengan dokumentasi peneliti diharapkan dapat melacak dokumen pribadi sang tokoh. Dokumen pribadi menunjuk pada tulisan tangan pertama yang

bersifat deskriptif dari sang tokoh tentang seluruh atau sebagian kehidupannya atau pemikiran sang tokoh mengenai kejadian atau topik tertentu. Dokumen pribadi terdiri dari dua jenis: dokumen pribadi berdasarkan permintaan (*solicited*) dan dokumen pribadi yang tidak berdasarkan permintaan (*unsolicited*) (Furchan dan Maimun, 2005: 54).

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini utamanya berupa karya-karya Ahmad Syafii Maarif, serta referensi-referensi yang relevan dan memuat tentang perjalanan hidup, pemikiran, ide, gagasan dan jasa-jasanya.

5. Teknik Analisis Data

Adapun Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Dalam hal ini digunakan analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Untuk itu digunakan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri memiliki banyak sekali ragam penelitian yang demikian, maka metode analisis deskriptif lebih merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif. Di antaranya ialah menuturkan, menganalisa, dan mengklarifikasi (Surakhmad, 1989: 143-144).

Sementara secara implementatif, analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah tokoh. Hakikat sejarah tokoh adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide atau gagasan orisinal, serta konteks sosio-historis yang melingkupi sang tokoh yang dikaji (Mustaqim, 2014: 263). Pendekatan sejarah tokoh merupakan pengembangan dari studi tokoh. Studi tokoh yang ada selama ini dilakukan dalam dua bentuk. *Pertama*, sebagai bagian dari pendekatan sejarah (*historical approach*) yang bersangkutan. *Kedua*, studi ini sering kali dikelompokkan pada bidang yang dibicarakan oleh tokoh yang bersangkutan. Misalnya, jika seorang tokoh membicarakan tasawuf, maka studi ini dimasukkan pada pendekatan tasawuf (Harahap, 2011: 4).

Adapun secara praktis penelitian sejarah tokoh bertumpu yang bertumpu pada empat langkah kegiatan yakni: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Kasdi, 2005: 8).

Tahap heuristik merupakan tahap dalam mencari data dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang diperoleh melalui berbagai literature (Kasdi, 2005: 8) terkait sosok Ahmad Syafi'i Maarif dan perjuangannya dalam dakwah kebangsaan. Sumber sejarah yang diperoleh dalam bentuk dokumen tertulis seperti surat kabar dan arsip negara. Berisi tentang data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian. Kemudian informasi dalam sumber sejarah tersebut di uji kebenarannya dan dicari keberadaannya.

Kemudian tahapan kritik sumber yang dilakukan penulis adalah melalui proses pembacaan sumber tertulis yang telah ditemukan, dengan begitu data kemudian dapat diseleksi, ditelaah dan dipilah-pilah dan diuji kebenarannya (Kasdi, 2005: 8). Penulis menggunakan kritik intern dalam penulisan ini dengan apa yang tampak semata ataupun yang dapat dilakukan dari informasi yang menerangkan kejadian terkait dakwah kebangsaan Ahmad Syafi'i Ma'arif.

Selanjutnya tahap interpretasi atau penafsiran, yakni merupakan pengumpulan fakta-fakta tersebut secara koheren yang disusun secara sistematis dan kronologis sehingga membentuk sebuah eksplanasi narasi sejarah tokoh tersebut yang runut dan kronologis untuk mengungkapkan kembali suatu peristiwa (Kasdi, 2005: 8). Tahapan interpretasi merupakan suatu proses mendeskripsikan secara kritis analitis sesuai dengan tema penelitian yang akan menjawab rumusan masalah.

Ada pun dalam penelitian ini, posisi studi tokoh diletakkan pada kriteria yang pertama, yakni sebagai bagian dari pendekatan sejarah yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk pendekatan sejarah tokoh. pendekatan ini digunakan dengan maksud mampu menggali secara mendalam tentang dakwah kebangsaan yang dilakukan oleh Ahmad Syafii Maarif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat dipahami urutan dan pola berpikir dari tulisan ini, maka penelitian ini disusun dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain saling melengkapi. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini.

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Dakwah dan Dakwah Kebangsaan. Bab ini menjelaskan tentang kerangka teoritik yang memaparkan variabel penelitian. Pada penelitian ini menguraikan teori tentang dakwah dan dakwah kebangsaan.

BAB III: profil Ahamd Syafii Maarif dan konsep pemikirannya. Menguraikan biografi Ahmad Syafi'i Maarif dan konsep pemikiran dakwah kebangsaan yang telah dilakukannya.

BAB IV: analisis konsep dakwah kebangsaan Ahmad Syafii Maarif dalam konteks Indonesia. Bab ini berisi analisa konsep pemikiran Ahmad Syafi'i Maarif tentang dakwah kebangsaan Indonesia dengan menggunakan pendekatan studi tokoh.

BAB V: Penutup yang memuat tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan salam penutup.

BAB II

DAKWAH KEBANGSAAN

A. Dakwah Kebangsaan

1. Dakwah

Mengenai pengertian dakwah, Al-Awa'iy (2012:7-8) menjelaskan bahwa secara bahasa, ada banyak makna yang terkandung dalam kata dakwah, di antaranya sebagaimana di bawah ini:

- 1) Dakwah memiliki makna *an-nida'* panggilan. Kalimat *da'a fulanun fulanan* artinya adalah si fulan memanggil si fulan.
- 2) Dakwah memiliki makna mengajak kepada sesuatu; mendorong orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan.
- 3) Dakwah memiliki makna mengajak kepada suatu hal agar diyakini dan didukung, baik hal tersebut benar mau pun salah, misalnya, dakwah yang salah seperti yang dikisahkan dalam surat Yusuf ayat 33:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۖ ۝ ٣٣

Artinya: Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh"(Departemen Agama RI, 2003:239).

- 4) Dakwah memiliki makna sebagai sebuah usaha melalui perkataan atau perbuatan untuk membuat orang cenderung kepada sebuah madzhab atau aliran
- 5) Dakwah memiliki makna munajat dan berdo'a. Dalam kamus *Al-Misbahul Munir* disebutkan, kalimat *da'autu Allaha du'aan* artinya aku memanjatkan kepada Allah sebuah permintaan.

Sementara dalam pengertian istilah dakwah oleh beberapa tokoh diartikan sebagai berikut (Saputra, 2011: 1-2):

- 1) Prof. Toha Yahya Oemar menyatakan bahwa dakwah Islam sebagai upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat (2011: 1).
- 2) Syaikh Ali Makhfudz, dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin memberikan definisi dakwah sebagai berikut: dakwah Islam yaitu; mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk (hidayah), menyeru mereka berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat (2011: 1).
- 3) Hamzah Ya'kub mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmah (kebijaksanaan) untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya (2011:1).
- 4) Menurut Prof. Dr. Hamka dakwah adalah seruan panggilan untuk menganut suatu pendirian yang ada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi terletak pada aktivitas yang memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar (2011: 2).
- 5) Syaikh Abdullah Ba'alawi mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak membimbing, dan memimpin orang yang belum mengerti atau sesat jalannya dari agama yang benar untuk dialihkan ke jalan ketaatan kepada Allah, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka berbuat buruk agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat (2011: 3).

Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dakwah menjadikan perilaku muslim dalam menjalankan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang harus didakwahkan kepada seluruh manusia, yang dalam prosesnya melibatkan unsur: *da'i* (subjek), *maaddah* (materi), *thoriqoh* (metode), *washilah* (media), dan *mad'u* (objek) dalam mencapai *maqashid* (tujuan) dakwah yang melekat dengan tujuan Islam yaitu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Saputra, 2011: 3).

2. Kebangsaan

Kebangsaan adalah satu sudut pandang suatu bangsa dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya pada dasarnya merupakan penjabaran dari falsafah bangsa itu sesuai dengan keadaan wilayah suatu negara dan sejarah yang dialaminya. Wawasan ini menentukan cara suatu bangsa memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya serta bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungannya baik ke dalam maupun ke luar. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), makna dan hakikat serta pengejawantahan wawasan kebangsaan tersebut penting dipahami oleh setiap warga negara Indonesia (Suhady dan Sinaga, 2006: 1).

Adapun mengenai pengertian bangsa secara umum adalah kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara. Dalam arti sosiologis bangsa termasuk "kelompok paguyuban" yang secara kodrat ditakdirkan untuk hidup bersama dan senasib sepenanggungan di dalam suatu negara. Misalnya Negara Republik Indonesia ditakdirkan terdiri atas berbagai suku bangsa.

Dalam Ilmu Tata Negara terdapat berbagai pengertian mengenai istilah bangsa. Mengenai pengertian bangsa berikut ini oleh Budiyo sebagaimana dikutip Suhady dan Sinaga (2006: 12-13), dikemukakan pendapat beberapa pakar kenegaraan yang ternama seperti:

1. Ernest Renan (Prancis)

Bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (hasrat bersatu) dengan perasaan setia kawan yang agung.

2. Otto Bauer (Jerman)

Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter. Karakteristik tumbuh karena adanya persamaan nasib.

3. Ratzel (Jerman)

Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya (paham geopolitik).

4. Hans Kohn (Jerman)

Bangsa adalah buah hasil hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beranekaragam dan tidak bisa dirumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain. Faktor-faktor itu berupa persamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat, kesamaan politik, perasaan, dan agama.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. Caranya ialah dengan mendirikan negara yang akan mengurus terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama secara adil (Suhady dan Sinaga, 2006: 12-13).

Secara individu, setiap orang tentu memiliki rasa kebangsaan dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan atau pikiran, paling tidak di dalam hati nuraninya. Dalam realitas, rasa kebangsaan itu seperti sesuatu yang dapat dirasakan tetapi sulit dipahami. Namun ada getaran atau resonansi dan pikiran ketika rasa kebangsaan tersentuh. Rasa kebangsaan bisa timbul dan terpendam secara berbeda dari orang per orang dengan naluri kejuangannya masing-masing, tetapi bisa juga timbul dalam kelompok yang berpotensi dasyat luar biasa kekuatannya (Loso, 2014: 125).

Fredrich Hertz dalam bukunya *Nationality in History and Politics* sebagaimana dikutip Suhady dan Sinaga (2006: 14) mengemukakan bahwa setiap bangsa mempunyai 4 (empat) unsur aspirasi sebagai berikut:

1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas;

2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya;
3. Keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian, atau kekhasan. Misalnya, menjunjung tinggi bahasa nasional yang mandiri;
4. Keinginan untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise.

Mengaca pada hal tersebut, dalam konteks keindonesiaan tentunya Motto kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat Indonesia adalah “Bhineka Tunggal Ika”, menjadi implementasi paling representatif dari rasa kebangsaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Indonesia mempunyai ribuan pulau dengan ragam suku yang berbeda, karakter sosial berbeda, bahasa lokal berbeda, dan pandangan hidup yang berbeda, namun dengan semangat dan pandangan yang melekat di dalam Pancasila yang telah disepakati sebagai nilai bersama, maka perbedaan tersebut menjadi sebuah asset bangsa yang sangat luar biasa. Dan bersama Pancasila inilah kemudian perbedaan tersebut disatukan dan dijadikan sebagai nilai dasar dan falsafah hidup bersama yang tertuang di dalam lima silanya.

Persamaan pandangan nilai ini pulalah yang kemudian membentuk sebuah pandangan atau wawasan bersama atau lebih tepat dijadikan sebagai wawasan kebangsaan. Dan, dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang ketika jaman kerajaan Majapahit disatukan dalam wadah nusantara, maka wawasan kebangsaan yang seyogianya dibangun adalah wawasan nusantara, karena cakupan pengetahuan anak bangsa haruslah bersifat universal di seantero wilayah nusantara. Keluasan pandangan ini kemudian diharapkan dapat membentuk kesamaan niat untuk tetap bersatu dan menjaga keutuhan bersama untuk tetap berada dalam rangkulan dan balutan NKRI (Mahifal, 2014: 8).

Secara implementatif, tentu makna dari dakwah kebangsaan adalah memastikan dan menerapkan antara nasionalisme (kebangsaan) dan dakwah bukanlah dua hal yang harus saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya merupakan dua unsur yang saling mendukung satu sama lain dalam upaya menerapkan Islam *rahmatan lil alamin* dalam suatu bangsa.

5. Dakwah Kebangsaan

Berdasarkan berbagai paparan di sub bab sebelumnya, tentu dapat diartikan dakwah kebangsaan merupakan dakwah yang dikontekstualisasikan dan disinergiskan dalam nilai-nilai ke-Indonesiaan adalah sebagai problem solving untuk menjawab tantangan dan hajat umat demi keberlangsungan generasi bangsa. Dengan kata lain, dakwah kebangsaan dalam konteks Indonesia memiliki titik berat dalam menyebarkan dan memperjuangkan Islam *rahmatan lil alamin* dengan tetap berprinsip menjaga keutuhan NKRI dengan Pancasila dan UUD sebagai landasan ideologis dalam berbangsa dan bernegara.

Secara implementatif menurut Cholil Nafis dakwah kebangsaan diwujudkan dengan memperkokoh NKRI dan UUD 45. Memaksakan sistem khilafah di negara Indonesia yang telah sepakat dan final melatakan dasar negara berasaskan Pancasila berarti pengkhianatan terhadap janji persatuan. Inilah bughat yang haram dan yang harus diperangi bersama, sebab umat Islam Indonesia melalui ijtihad para ulama telah mengikat janji dalam ikatan Negara Kesatuan Indonesia. Rasulullah SAW bersabda: "Al-muslimuna 'inda syuruthihim" (umat Islam terikat dengan janjinya). Oleh karena itu, kami sepakat atas kebijakan pemerintah untuk mencegah segala bentuk gerakan yang mengancam kesatuan bangsa. Dan, jika ketetapan itu dari organisasi kemasyarakatan Islam tak berarti memusuhi Islam, sebab paham Islam sejatinya di Indonesia dapat mengharmonisasi agama dan negara. Bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan oleh para ulama. Untuk itu, langkah pemerintah untuk menertibkan ormas ataupun kelompok yang anti NKRI dan Pancasila perlu diberikan dukungan dengan syarat penegakkan hukum dilakukan secara

adil dan tidak tebang pilih untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya, agama dan negara harus berjalan bersama bagai dua mata sisi uang. Negara memerlukan nilai-nilai agama untuk memberi arah yang baik dan agama memerlukan negara untuk menciptakan disiplin dan keteraturan sosial (Kumparan.com, diakses pada 12 Juli 2018).

Adapun gagasan perihal dakwah kebangsaan merupakan sebuah gerakan yang sudah diprakarsai oleh dua sayap besar umat Islam di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah. Keduanya memang dikenal memiliki komitmen kuat terhadap keutuhan dan keberlangsungan Bangsa ini yang diimplementasikan dalam berbagai hal prinsip dalam gerak perjuangan mereka.

Muhammadiyah misalnya, gagasan dakwah kebangsaan bisa ditemui dalam beberapa dokumen yang pernah terbit dalam sejarah Muhammadiyah berikut. Dalam penjelasan Pedoman Untuk Memahami MKCH (Tanwir Ponorogo 1969) dinyatakan fungsi dan misi gerakan ini (Hasyim dalam Mulkan, 2010: 220):

“Muhammadiyah menyadari kewajibannya: berjuang dan mengajak segenap golongan dan lapisan Bangsa Indonesia, untuk mengatur dan membangun Tanah Air dan Negara Republik Indonesia, sehingga merupakan masyarakat dan Negara adil dan makmur, sejahtera bahagia, materil dan sprituil yang diridai Allah Swt.”

Hal yang sama juga bisa ditemui dalam tubuh NU (Nahdhatul Ulama). Motif nasionalisme bahkan timbul karena NU lahir dengan niatan kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajahan. Semangat nasionalisme itu pun terlihat juga dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri yakni “Kebangkitan Para Ulama”. NU pimpinan Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari sangat nasionalis. Sebelum RI merdeka, para pemuda di berbagai daerah mendirikan organisasi bersifat kedaerahan, seperti Jong Cilebes, Pemuda Betawi, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan sebagainya, akan tetapi kiai-kiai NU justru mendirikan organisasi pemuda bersifat nasionalis. Pada tahun 1924 para pemuda pesantren mendirikan Shubban al-Waṭān (Pemuda

Tanah Air). Organisasi pemuda itu kemudian menjadi Ansor Nahdlatul Ulama (ANO) yang salah satu tokohnya adalah Kiai Muhammad Yusuf Hasyim (Farih, 2016: 252).

Melihat kenyataan di atas, tentu tidak berlebihan jika mengatakan bahwa kedua poros besar umat Islam di Indonesia merupakan pondasi yang terus melanggengkan dakwah kebangsaan demi keberlangsungan selarasnya umat Islam dalam konteks kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

BAB III

DAKWAH KEBANGSAAN SYAFI'I MAARIF DI INDONESIA

A. Biografi Ahmad Syafi'i Maarif

Ahmad Syafi'i Ma'arif dilahirkan pada 31 Mei 1935 di sebuah desa di Sumpur Kudus, Sumatra Barat, sebuah daerah yang sumber penghasilannya dari perdagangan serba kecil dan tani. Putra Bungsu dari empat bersaudara pasangan Ma'rifah Rauf dan Fathiyah (Maarif, 2009: 22). Sumpur Kudus adalah kawah pertama yang telah membentuk mental Buya Syafii, begitu ia biasa dipanggil, menjadi sosok yang sederhana dan religius, karena desa ini, menurut Buya Syafii, pada saat itu merupakan pusat bisnis perdagangan emas sekaligus juga pusat kajian Islam. Setelah melewati masa kecilnya di desa yang bersahaja itu, Buya Syafii melanglang buana (Damanhuri, 2015: 77).

Pendidikan S1-nya dihabiskan di Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto, Solo, hingga memperoleh gelar sarjana muda. Setamat dari Fakultas Hukum, ia melanjutkan pendidikannya ke IKIP Yogyakarta, dan memperoleh gelar sarjana sejarah. Dalam upaya menekuni ilmu sejarahnya, Buya Syafii mengikuti Program Master di Departemen Sejarah Universitas Ohio, AS. Sementara gelar doktornya diperoleh dari Program Studi Bahasa dan Peradaban Timur Dekat, Universitas Chicago, AS, dengan disertasi: *Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia* (Damanhuri, 2015 :78).

Meski sejak kecil sudah mengenal Muhammadiyah, Syafi'i baru benar-benar menjadi pengurus organisasi Islam itu sepulang dari Chicago. Pada tahun 1985, ia bergabung di Majelis Tabligh Muhammadiyah hingga akhirnya ia bisa menjadi Ketua PP Muhammadiyah tahun 1998. Guru besar UNY Yogyakarta ini juga pernah menjadi dosen pasca sarjana IAIN Yogyakarta. Sebelumnya ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah pada 1999-2004, tokoh yang juga pernah aktif di GPII dan pemuda

Muhammadiyah, menggantikan Amien Rais yang memilih serius di partai politik PAN (Hamithan, 2010:51).

Sebagai kolumnis, dosen Pasca-Sarjana IAIN Yogyakarta yang sehari-harinya mengajar di FP IPS IKIP Yogyakarta ini menulis artikel di majalah Panji Masyarakat, Suara Muhammadiyah, Genta, di samping di harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta. Sebagian besar tulisannya adalah masalah-masalah Islam, dan dipublikasikan di sejumlah media cetak. Selain itu, ia juga menuangkan pikirannya dalam bentuk buku. Bukunya yang sudah terbit, antara lain, berjudul *Dinamika Islam dan Islam, Mengapa Tidak?*, kedua-duanya diterbitkan oleh Shalahuddin Press, 1984. Kemudian *Islam dan Masalah Kenegaraan*, yang diterbitkan oleh LP3ES, 1985, *Mengapa Vietnam Jatuh Seluruhnya ke Tangan Komunis*, oleh Yayasan FKIS-IKIP, 1975, *Percik-percik Pemikiran Iqbal*, Shalahuddin Press, 1984, *Independensi Muhammadiyah di tengah pergumulan pemikiran Islam dan politik*, Pustaka Cidesindo bekerja sama dengan Dinamika, 2000, *Islam & politik: upaya membingkai peradaban*, Pustaka Dinamika, 1999 (dikutip dari Tokoh Indonesia Dot Com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia Ahmad Syafii Ma'arif, [www. Ghabopedia.com](http://www.Ghabopedia.com), tanggal 6 September 2017 pukul 13.14 WIB).

Ahmad Syafii Maarif merupakan sosok unik yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Meskipun Muhammadiyah bukan merupakan organisasi yang memberikan perhatian serius dalam hal perkembangan pemikiran Islam menyangkut pluralism, dialog antar-agama, dan apalagi sekularisme yang menjadi perdebatan di kalangan intelektual muslim Indonesia. Namun Syafii Maarif merupakan figur Muhammadiyah yang terkadang dipersoalkan terkait pemikiran-pemikirannya yang dianggap “tidak sejalan dengan Muhammadiyah” (Qodir, 2010: 57).

Secara pemikiran, tentu hal tersebut tidak mengherankan, sebab Buya Syafii sendiri merupakan salah satu tokoh yang dikenal mewarisi Fazlur Rahman yang notabene pernah menjadi gurunya ketika menimba ilmu di Chicago (Baso, 2006: 247). Fazlur Rahman sendiri dikenal sebagai salah satu pemikir Muslim terbesar abad ke-20. Betapa tidak, ide-idenya tanpa disadari

telah membuahkan revolusi pemikiran. Ide-ide yang diarahkan untuk mengkritisi rancang-bangun keilmuan Islam itu telah membekas dan mendatangkan ilham bagi banyak pemikir Muslim setelahnya (Bawaihi, 2013: 135). Maka tidak mengherankan jika kemudian Syafii Maarif memiliki kontruksi pemikiran yang terkadang bertolak belakang dengan Muhammadiyah, sebab bahkan bagi sebagian orang Ahmad Syafii Maarif dianggap cenderung liberal.

Namun hakikatnya pemikiran Syafii Maarif memiliki tujuan yang bermuara pada keutuhan dan kedamaian bangsa ini. Sebagaimana Buya Syafii menolak adanya gagasan tentang negara Islam, menurutnya gagasan tentang negara Islam tidak memiliki basis religio-intelektual yang kukuh. Piagam Madinah yang merupakan hasil karya Rasulullah tidak menyingung sama sekali masalah negara Islam, sehingga Buya Syafii menganggap bahwa fenomena Negara Islam merupakan fenomena abad 20. Tetapi juga tidak dapat diabaikan bahwa Islam membutuhkan sebuah mesin pemaksa dalam bentuk negara dengan kekuasaan politik untuk membumikan cita-cita dan ajaran moral yang terdapat dalam Al-Qur'an. Posisi Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an hanyalah sebagai seorang rasul, tetapi juga tidak dapat dipungkiri dalam perjalanan sejarah Nabi Muhammad pernah menjabat sebagai pemimpin negara sekaligus sebagai pemimpin agama. Posisi sebagai Rasulullah tidak pernah berubah hingga beliau wafat pada 632 M, kedudukan Nabi Muhammad sebagai rasul ini termaktub dalam Ali-Imron: 144 "Muhammad hanyalah seorang Rasul". Ayat inilah yang kemudian digunakan oleh Buya Syafii untuk menolak *statement* bahwa Islam adalah agama dan negara, bagi Buya Syafii *statement* ini akan mengaburkan hakikat yang sebenarnya dari posisi kenabian Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa dan juga tidak pernah mendeklarasikan sistem dan bentuk pemerintahan yang baku, yang harus diikuti oleh umat Islam (Solikin, 2012:198-99).

Oleh karenanya menyebut dakwah kebangsaan maka Ahmad Syafii Maarif merupakan satu diantara beberapa tokoh yang dengan konsisten

mempraktikan sekaligus mengajarkan kepada masyarakat agar keberlangsungan Negeri ini tetap berjalan di atas pondasi keseimbangan antara Agama, Negara dan Bangsa.

Adapun secara singkat berikut biografi Ahmad Syafi'i Maarif sebagaimana dikutip dari (Koran Media Indonesia, Minggu, 1 Agustus 2010: 18) seperti berikut:

Nama : Prof Dr H Ahmad Syafi 'i Ma'arif

Panggilan : Buya Syafi 'i

Lahir : Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung,

Sumatra Barat, 31 Mei 1935

Istri : Hj Nurkhalifah

Anak : Mohammad Hafi z

(dua kakaknya meninggal dunia)

Pendidikan :

- Sekolah Rakyat Ibtidaiyah di Sumpur Kudus pada 1947 (tidak berijazah). Bertelanjang kaki ke sekolah (sekolah rakyat), menempuh jarak 2 km dari rumahnya di Calau, Sumpur Kudus, Sumatra Barat
- Madrasah Mu'allimin Lintau, Sumatra Barat (pindah ke sekolah yang sama di Yogyakarta)
- Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah di Yogyakarta sampai tamat (1956)
- Melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Surakarta (Sarjana Muda) Gelar sarjananya diperoleh dari IKIP Yogyakarta (1965-1968)
- Gelar master pada Departemen Sejarah Universitas Ohio, Amerika Serikat (1976-1978), beasiswa dari Ford Foundation
- Gelar doktoral diperoleh dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, di Program Studi Bahasa-Bahasa Timur Dekat dan Peradaban dengan fokus kajian tentang pemikiran Islam di bawah payung Studi Kearaban dan Islam

Karier :

- Anggota Kelompok Pemikir Masalah Agama Departemen Agama (1984-kini)

- Guru Besar IKIP Yogyakarta
- Dosen Pascasarjana IAIN Yogyakarta

Organisasi :

- Anggota Muhammadiyah (1955-kini)
- Anggota HMI (1957-1968)
- Pengurus HMI Surakarta (1963-1964)
- Pejabat sementara Ketua Umum PP Muhammadiyah
- Ketua Umum PP Muhammadiyah (Desember 1998-8 Juli 2005)

Aktivitas :

- Setelah meninggalkan posisinya sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, kini ia aktif dalam komunitas Maarif Institute. Di samping itu, guru besar IKIP Yogyakarta ini juga menulis, di samping menjadi pembicara dalam sejumlah seminar. Sebagian besar tulisannya adalah masalah-masalah Islam dan dipublikasikan di sejumlah media cetak. Selain itu, ia juga menuangkan pikirannya dalam bentuk buku. Atas karya-karyanya, pada 2008 Syafi'i mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay dari pemerintah Filipina.

Karya tulis (di antaranya):

- Mengapa Vietnam Jatuh Seluruhnya ke Tangan Komunis, Yayasan FKIS-IKIP, Yogyakarta, 1975.
- Dinamika Islam, Shalahuddin Press, 1984.
- Islam, Mengapa Tidak?, Shalahuddin Press, 1984.
- Percik-percik Pemikiran Iqbal, Shalahuddin Press, 1984.
- Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1985

B. Pandangan Ahmad Syafi'i Maarif terkait Islam dan Negara

1. Negara berkeadilan bukan negara Islam

Dalam kesempatan ini, penulis akan mendedahkan pandangan Ahmad Syafii Maarif tentang hubungan Islam dan negara. Diskusi mengenai tema ini mencakup dua aspek, yakni aspek normatif dan aspek historis. Dengan mendiskusikannya, diharapkan dapat memperjelas bagaimana sesungguhnya relasi Islam dan negara.

Menurut Ahmad Syafii Maarif, secara doktrinal, Islam tidak menetapkan dan menegaskan pola apapun tentang teori negara Islam yang wajib digunakan oleh kaum Muslim. H.A.R. Gibb seperti dikutip Buya Ahmad Syafii Maarif, memaparkan bahwa baik Al-Qur'ân maupun Sunnah tidak memberikan petunjuk yang tegas tentang bentuk pemerintahan dan lembaga-lembaga politik lainnya sebagai cara bagi umat untuk mempertahankan persatuannya (Maarif dalam Asroni, 2011: 361).

Terminologi “kerajaan Islam”, “kesultanan Islam” atau “monarkhi Islam” menurut Buya Syafii Maarif sebenarnya bersifat kontradiktif di dalamnya. Monarkhi, kesultanan, dan seterusnya tidak secara otomatis dapat menjadi Islam kendatipun menggunakan embel-embel nama Islam. Ia juga mengkritik gagasan negara Islam. Menurutnya, gagasan negara Islam tidak memiliki basis religio-intelektual yang kukuh, yang berbicara secara teoretik. Terminologi negara Islam tidak ada dalam kepustakaan Islam klasik. Dalam Piagam Madinah pun, terminologi ini tidak ditemukan. Gagasan negara Islam (daulatul-islâmiyyah), menurutnya, merupakan fenomena abad ke-20. Kendati demikian, Islam sangat membutuhkan mesin negara untuk membumikan cita-cita dan ajaran-ajaran moral. Al-Qur'ân yang penuh dengan ajaran imperatif moral, lanjutnya, tidak diragukan lagi sangat membutuhkan negara sebagai institusi “pemaksa” bagi pelaksanaan perintah dan ajaran moralnya (Maarif dalam Asroni, 2011: 361).

Menurut Buya Ahmad Syafii Maarif, Islam tidak memperlakukan apapun nama dan bentuk pemerintahan, Islam hanya menekankan pentingnya moral-etik dalam kehidupan bernegara. Al-Qur'ân tidak memberikan suatu pola teori atau sistem yang pasti, yang harus diikuti oleh umat Islam. Hal ini menurutnya disebabkan dua hal; Pertama, Al-Qur'ân pada prinsipnya merupakan petunjuk etik bagi manusia, ia bukanlah kitab ilmu politik. Kedua, institusi-institusi sosio-politik dan organisasi manusia senantiasa berubah dari masa ke masa. Dengan kata lain, diamnya Al-Qur'ân dalam masalah ini dapat diartikan bahwa Al-Qur'ân memberikan suatu jaminan yang sangat esensial bagi manusia untuk mencari sistem yang tepat. Tujuan terpenting Al-Qur'ân dan juga Islam adalah supaya nilai-nilai dan perintah-perintah etiknya dijunjung tinggi dan bersifat mengikat terhadap kegiatan-kegiatan sosio-politik umat Islam.

Nilai-nilai tersebut secara perenial, integral dengan prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan kemerdekaan yang kesemuanya itu menempati posisi sentral dalam ajaran moral Al-Qur'ân. Sebagai suatu petunjuk bagi umat manusia, Al-Qur'ân menurut Ahmad Syafii Maarif menyediakan suatu fondasi yang kukuh dan tak berubah bagi semua prinsip etik dan moral bagi kehidupan ini. Al-Qur'ân memperlakukan kehidupan manusia sebagai suatu keseluruhan yang organik dan integralistik yang semua bagian-bagiannya harus dibimbing oleh petunjuk dan perintah-perintah etik dan moral yang bersumber pada kitab ini (Maarif, 1997: 62).

Untuk merealisasikan segenap ajaran Islam, sebagaimana telah penulis sebutkan di atas, menurut Buya Syafii Maarif, Islam membutuhkan instrumen yang disebut negara. Negara dibutuhkan guna menyokong agama. Bagi Ahmad Syafii Maarif negara merupakan alat yang penting bagi agama.⁴² Namun demikian, agama (Islam) tidak harus atau dijadikan dasar negara. Aspirasi politik hendaknya bukan menjadikan Islam sebagai dasar negara dan memformalisasikan Syariat

Islam, akan tetapi menjalankan kehidupan atas dasar kebersamaan dan musyawarah (syûrâ). Hal ini sejalan dengan pesan Al-Qur'ân yang menghendaki terciptanya masyarakat (Maarif dalam Asroni, 2011: 367).

Dalam sejarah Islam kelompok Islam yang merasa paling shahih dalam keimanannya juga tidak sulit untuk dilacak. Jika sekedar merasa paling benar tanpa menghukum pihak lain barangkali tidaklah terlalu berbahaya. Bahaya akan muncul bilamana ada orang yang mengatasnamakan Tuhan, lalu menghukum dan bahkan membinasakan keyakinan yang berbeda. Dalam bacaan, dalam banyak kasus, al-Qur'an jauh lebih toleran dibandingkan dengan sikap segelintir muslim intoleran terhadap perbedaan. Fenomena semacam ini dapat dijumpai di berbagai negara baik di negara maju, maupun di negara yang belum berkembang, tidak saja di dunia Islam. Apa yang dikategorikan sebagai golongan fundamentalis berada dalam kategori ini. Di amerika misalnya kita mengenal golongan fundamnetalis kristen yang di era Presiden George W. Bush menjadi pendukung utama rezim neo-imperalis ini. Di dunia Islam, secara sporadis sejak beberapa tahun terakhir gejala fundamentalisme ini sangat dirasakan. Yang paling ekstrem di antara mereka mudah terjatuh ke dalam perangkap terorisme (Maarif, 2009: 8).

Ada beberapa teori yang telah membahas fundamentalisme yang muncul di dunia Islam. Yang paling banyak dikutip adalah kegagalan umat Islam menghadapi arus modernitas yang dinilai telah sangat menyudutkan Islam,. Karena ketidakberdayaan menghadapi arus panas itu, golongan fundamentalis mencari dalil-dalil agama untuk “menghibur diri” dalam sebuah dunia yang dibayangkan belum tercemar. Jika sekedar “menghibur” barangkali tidak akan menimbulkan banyak maslah. Tetapi sekali mereka menyusun kekuatan politik untuk melawan modernitas melalui berbagai cara, maka benturan dengan golongan muslim yang tidak setuju dengan cara-cara mereka tidak dapat dihindari. Ini tidak berarti bahwa umat Islam yang menentang cara-cara mereka itu telah larut dalam modernitas. Golongan penentang ini tidak kurang kritisnya

menghadapi arus modern ini, tetapi cara yang ditempuh dikawal oleh kekuatan nalar dan pertimbangan yang jernih, sekalipun tidak selalu berhasil.

Teori lain mengatakan bahwa membesarnya gelombang fundamentalisme di berbagai negara muslim terutama didorong oleh rasa ketediaksetiakawanan terhadap nasib yang menimpa saudara-saudaranya di Palestina, Kashmir, Afganistan, dan Iraq. Perasaan solider ini sesungguhnya dimiliki oleh seluruh umat Islam sedunia. Tetapi yang membedakan adalah sikap yang ditunjukkan oleh golongan mayoritas yang sejauh mungkin menghindari kekerasan dan tetap mengibarkan panji-panji perdamaian, sekalipun peta penderitaan umat di kawasan konflik itu sering sudah tak tertahankan lagi. Jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia yang relatif aman, kemunculan kekuatan fundamentalisme, dari kutub yang lunak sampai ke kutub yang paling ekstrem (terorisme), seungguhnya berada di luar penalaran. Kita ambilmisal praktik bim bunuh diri sambil membunuh manusia lain di berbagai kasus, sama sekali tidak bisa difahami. Indonesia bukan Palestina, bukan Kashmir, bukan Afganistan, dan buakn Iraq, tetapi mengapa praktik biadab itu dilakukan disini? (Maarif, 2009: 8)

Teori ketiga, khususnya untuk Indonesia, maraknya fundamentalisme di Nusantara lebih disebabkan oleh kegagalan negara mewujudkan cita-cita kemerdekaan berupa tegaknya keadilan sosial dan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Korupsi yang masih menggurita adalah bukti nyata dari kegagalan itu. Semua orang mengakui kenyataan pahit ini. Namun karena pengetahuan golongan fundamnetalis ini sangat miskin tentang peta sosisologis Indonesia yang memang tidak sederhana, maka mereka menempuh jalan pintas bagi tegaknya keadilan; melaksanakan syariat Islam melalui kekuasaan. Jika secara nasional belum mungkin, maka diupayakan melalui Perda-Perda (Peraturan Daerah). Dibayangkan dengan pelaksanaan syariat ini, Tuhan akan meridhai Indonesia. Anehnya, semua kelompok fundamentalis ini

anti demokrasi, tetapi mereka memakai lembaga negara yang demokratis untuk menyalurkan cita-cita politiknya. Fakta ini dengan sendirinya membeberkan satu hal: bagi mereka bentrokan antara teori dan praktik tidak menjadi persoalan. Dalam ungkapan lain, yang terbaca di sini adalah ketidakjujuran dalam berpolitik. Secara teori demokrasi diharamkan, dalam praktik digunakan, demi tercapainya tujuan (Maarif, 2009: 9).

Akhirnya menyertai keprihatinan kelompok-kelompok fundamentalis tentang kondisi Indonesia yang jauh dari keadilan, tetapi cara-cara yang mereka gunakan sama sekali tidak akan semakin mendekatkan negeri ini kepada cita-cita itu di tengah jalan. Masalah Indonesia, bangsa muslim terbesar di muka bumi, tidak mungkin dipecahkan oleh otak-otak sederhana yang lebih memilih jalan pintas, kadang-kadang dalam bentuk kekerasan. Demokrasi yang sedang dijalankan sekarang ini di Indonesia sama sekali belum sehat, dan jika tidak cepat dibenahi bisa menjadi sumber malapetaka buat sementara. Tetapi untuk jangka panjang, tidak ada pilihan lain, kecuali sistem demokrasi yang sehat dan kuat, Islam moderat dan inklusif akan tetap membimbing Indonesia untuk mencapai tujuan kemerdekaan (Maarif, 2009: 10).

2. Pancasila dasar Negara

Islam dalam representasi dakwah kebangsaan tentu kemudian dihadapkan dengan sisi dilematis dalam menghadapi bentuk Negara. Persoalan yang sering muncul adalah konsep negara Islam dalam Al-Qur'an. Harun Nasution, menyatakan bahwa tidak ada ayat-ayat yang dengan tegas membicarakan soal pembentukan negara. M. Amin Rais, lebih tegas lagi mengatakan bahwa dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak ada perintah yang menyatakan "Dirikanlah Negara Islam". Hal ini menurut Amin, justru menunjukkan keabadian wahyu yang didalamnya memuat etik dasar, serta norma-norma kemudian menyerahkan hal-hal detail pada akal manusia melalui ijtihad. Beberapa pendapat tersebut senada dengan

Syafii Maarif sehingga mempertanyakan apa alasan umat Islam menolak dasar negara pancasila? Bukankah Islam tidak menutup upaya-upaya akal dalam mengatasi problem kehidupan, selama masih berada pada koridor Islam (Widayati, 2009: 220).

Lebih spesifik beberapa abad kemudian muncul dua sayap besar umat Islam di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, yang sudah sejak awal bekerja keras untuk mengembangkan sebuah Islam yang ramah kepada siapa saja, bahkan terhadap kaum tidak beriman sekalipun, selama semua pihak saling menghormati perbedaan pandangan (Maarif, 2009: 7).

Hubungan Islam dan negara (politik) sepertinya tidak pernah habis untuk diperbincangkan. Hingga sekarang, wacana tentang perlu tidaknya agama mewarnai kehidupan negara –dalam berbagai bentuknya— masih terus menuai pro dan kontra. Ada banyak kalangan yang menghendaki Islam dijadikan dasar negara, namun tidak sedikit pula yang menginginkan Islam sebatas spirit dan penjaga moral-etik dalam bernegara. Masing-masing pihak memiliki argumentasinya sendiri-sendiri.

Sangatlah cukup dihadirkan melalui dasar negara kita, Pancasila. Jadi, negarakeadilan di sini tetap dalam sinaran wahyu Tuhan. Sebab, apabila Pancasila jauh dari terang wahyu Tuhan, maka ia bisa diartikan seenaknya saja. Tentusaja, pengertian wahyu di sini mengacu pada konteks keindonesiaan secara umum, di mana semua agama di negara ini dapat menyumbangkan semangat moralnya kepada Pancasila, yang pelaksanaannya senantiasa sesuai dengan sila “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sebagaimana kita ketahui bersama, dahulu selama bertahun-tahun para perumus negara ini berkelahi ihwal apakah undang-undang dan dasar negara adalah Islam atau Pancasila. Begitu juga dalam konstituante terjaditarik-menarik antara pihak-pihak yang mendesakkan Pancasila, Islam atau sosial ekonomi, yang kemudian mengerucut menjadi Islam dan Pancasila, yang keduanya akhirnya tidak mendapat dukungan dua pertiga,

sesuai dengan ketentuan yang diminta undang-undang sementara waktu itu (Maarif, 2012: 6).

Sehingga ditetapkanlah Dekrit 5 Juli tahun 1959 untuk membubarkan konstituante dan kembali ke UUD '45. Tetapi, di sana disebut juga bahwa Piagam Jakarta merupakan satu kesatuan dan bagian dari Dekrit tersebut. Walaupun sekarang dengan tegas menentang diperjuangkannya kembali Piagam Jakarta dan tuntutan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam – namun dahulunya, sebelum belajar banyak, termasuk ketika masih di Ohio University dan belum mengalami dalam lautan pengetahuan yang lebih dalam dan luas sebagaimana ketika mulai belajar di University of Chicago – salah satu orang yang dengan sangat kuat mendukung negara Islam. Pengalamannya hingga akhirnya sampai pada fase menolak Piagam Jakarta dan negara Islam terekam dalam buku otobiografinya (Maarif, 2012: 6).

3. Menolak Politik Identitas

Politik Identitas dengan Jubah Islam merupakan salah satu keprihatinan yang mendapat perhatian dari Syafii Maarif. Pada saat dunia Islam yang terpecah sedang berada di buritan peradaban sejak beberapa abad yang lalu, dalam pandangannya akan sangat sulit menemukan pribadi-pribadi Muslim yang mampu secara psiko-religio-kultural bersikap lebih tenang, objektif, dan realistis, kecuali mereka yang terdidik dan tercerahkan. Fenomena ini terutama terlihat di kalangan mereka yang merantau ke negara-negara Barat yang jumlah mereka semakin membengkak dari tahun ke tahun. Di Negara-negara Uni Eropa saja misalnya, sejak beberapa tahun terakhir, jumlah Muslim sudah mencapai 20 juta,⁶ sebuah jumlah yang cukup besar. Di Amerika penduduk Muslimnya bergerak antara 6-8 juta,⁷ baik yang berasal dari imigran maupun melalui konversi. Sekarang orang sudah mulai berbicara tentang Islam in the West, sebagai imbalan dari stereotipe Islam and the West sebagai kelanjutan dari konsep klasik Dâr al-Islâm dan Dâr al-Harb,

yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dunia mutakhir (Maarif, 2012: 26).

Di antara Muslim perantau di belahan bumi Barat itu, masih ada saja yang terpasung oleh konsep klasik Islam itu. Akibatnya perasaan keterasingan sering menghantui mereka di tanah air baru itu. Akan pulang kampung, situasi politik-ekonomi juga tidak memberi harapan, selain harus berhadapan dengan rezim-rezim despotik yang korup yang tidak jarang mendapat pembenaran agama dari ulama yang tak paham peta. Munculnya kelompok garis keras Muslim umumnya berasal dari mereka yang merasa terasing ini. Ini adalah di antara tragedi diaspora Muslim di awal abad ke-21 yang tidak jarang menggunakan jubah Islam sebagai politik identitasnya (Maarif, 2012: 27).

Tetapi mereka yang percaya bahwa Amerika, misalnya, dapat saja menjadi bumi Islam, sekalipun jumlahnya minoritas, akan bersikap lebih longgar dalam menafsirkan ajaran Islam untuk mencari jawab tentang makna keberadaan mereka di sana.⁸ Kelompok ini umumnya terdiri dari mereka yang terdidik dengan berbagai profesi yang mampu bertanding dengan penduduk asli. Mereka ini tidak perlu ribut dengan masalah politik identitas dengan memakai label Islam, karena mereka sudah merasa menjadi bagian dari mainstream masyarakat luas dengan segala kemampuan saringan kultural yang mereka miliki. Pengangkatan Dr. Ahmad Zewali (kelahiran 26 Februari 1946, asal Mesir), pakar kimia kaliber dunia, dan pemenang Hadiah Nobel 1999, menjadi salah seorang penasihat kepresidenan Obama di bidang sains dan teknologi April 2009 adalah di antara contoh tentang mobilitas sosial Muslim di Amerika (Maarif, 2012: 29).

Setelah kita menyoroti tipe-tipe politik identitas di negara-negara lain, tibalah saatnya kita turun ke Nusantara untuk mencoba meneropong isu serupa berdasarkan pengalaman sejarah dalam rentang waktu 100 tahun terakhir. Dengan uraian ini, ingin mengukuhkan posisi

intelektual Profesor Nurcholish Madjid dalam kaitannya dengan gagasan besarnya tentang Pancasila yang mungkin dapat diangkat menjadi kalimatun sawâ' (prinsip/pegangan/proposisi dasar bersama) bagi Indonesia, dulu, sekarang, dan di masa depan. Dengan Pancasila yang dipahami dan dilaksanakan secara jujur dan bertanggungjawab, semua kecenderungan politik identitas negatif-destruktif yang dapat meruntuhkan bangunan bangsa dan negara ini pasti dapat dicegah. Pluralisme etnis, bahasa lokal, agama, dan latar belakang sejarah, kita jadikan sebagai mozaik kultural yang sangat kaya, demi terciptanya sebuah taman sari Indonesia yang memberi keamanan dan kenyamanan bagi siapa saja yang menghirup udara di Nusantara ini (Maarif, 2012: 29).

Beralih kepada realitas politik Indonesia kontemporer. Yang menjadi burning issues dalam kaitannya dengan masalah politik identitas sejak 11 tahun terakhir ialah munculnya gerakan-gerakan radikal atau setengah radikal yang berbaju Islam di Indonesia. Sebagaimana partner mereka di bagian dunia lain, gerakan-gerakan ini juga anti-demokrasi dan anti-pluralisme, dan sampai batas-batas yang jauh juga anti-nasionalisme. Secara ideologis, mereka ini jelas mendapat inspirasi dan pengaruh dari gerakan Islamis dan Salafi yang semula berpusat di beberapa negara-negara Arab, kemudian dengan kecepatan tinggi menyebar ke seluruh jagat. Untungnya di Indonesia, sebagian besar masjid masih di bawah pengawasan Muhammadiyah dan NU, sekalipun ada beberapa yang terinfiltrasi oleh virus ideologi serba radikal itu (Maarif, 2012: 30).

Sekalipun gerakan Islamis dan Salafi ini terdiri dari berbagai faksi di Indonesia, dalam satu hal mereka punya tuntutan yang sama: pelaksanaan Syari'ah Islam dalam kehidupan bernegara. Faksi-faksi yang ingin kita bicarakan di sini ialah MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), FPI (Fron Pembela Islam), dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Sedangkan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang sesungguhnya ada lah

partai Islamis yang sangat dipengaruhi oleh cita-cita *al-Ikhwân al-Muslimûn* (Persaudaraan Muslim), bentukan Hassan al-Banna tahun 1928 di Mesir, menempuh jalan demokrasi untuk mencapai tujuannya. Apakah cara-cara demokrasi itu sebagai taktik PKS sebe lum menjadi kekuatan politik besar atau memang telah menerima demokrasi sebagai sebuah sistem politik, belum dapat dikatakan sekarang. Kita akan kembali lagi ke PKS ini pada bagian akhir maka lah ini. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa semua gerakan Islam yang sedang kita sorot ini telah menjadikan Islam sebagai politik iden titas mereka. Bedanya adalah MMI, FPI, dan HTI, tidak menyebut diri sebagai gerakan politik, sekalipun melakukan fungsi politik, sedang kan PKS jelas-jelas sebuah partai politik dan sekaligus partai dakwah (Maarif, 2012: 30).

Kita bicarakan sekadarnya tentang MMI, FPI, dan HTI. Sebenarnya literatur sudah tersedia yang membahas faksi-faksi Islam radikal ini. Seperti sudah dikatakan, semua faksi ini bersikeras untuk pelaksanaan Syari'ah dalam kehidupan bernegara. MMI misalnya sangat menyesalkan tersingkirnya Piagam Jakarta, khususnya pencoretan tujuh kata dari sila pertama Pancasila yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" pada 18 Agustus 1945 atas prakarsa Hatta. Bagi MMI, penolakan arus besar umat Islam Indonesia terhadap pelaksanaan Syari'ah secara konstitusional dengan sendirinya dapat masuk dalam kategori "kafir, fasiq, dan zalim." Berikutnya, kita lihat FPI yang didirikan 17 Agustus 1998 di Pesantren Al-Umm, Ciputat, Tangerang, diprakarsai oleh beberapa habib dan kiyai. Tentang latar belakang kelahirannya, dikatakan bahwa umat Islam telah lama menjadi korban penindasan, seperti yang berlaku di Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Haur Koneng, dan Sampang, tetapi tidak terungkap dan tidak mendapat keadilan.³⁴ Tetapi ada sebuah ironi di sini. Tersiar berita bahwa ada oknum tentara hadir dalam pertemuan itu, bahkan memberikan bantuan dana dan latihan militer. Apa artinya ini? Tidak lain: oknum militer sedang main api yang dapat membakar

Indonesia untuk jangka panjang, sekiranya kelompok-kelompok radikal ini dibiarkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama, seperti yang dilakukan atas gereja, Ahmadiyah, dan lain-lain, sementara aparat tidak mencegah perbuatan kriminal mereka (Maarif, 2012: 36).

Bagi FPI, segala tindakan kekerasan itu dinilai sebagai bagian dari prinsip nahi munkar (mencegah kemungkaran). Yang biadab adalah bahwa tindakan kekerasan itu dilakukan dengan cara-cara yang munkar oleh aparat swasta. Kemudian kita lihat selintas HTI. Berbeda dengan MMI dan FPI yang bercorak lokal Indonesia, HTI adalah gerakan politik transnasional yang pertama kali digagas antara lain oleh Taqiyuddin al-Nabhani, sempalan dari Ikhwan. Tujuan akhir perjuangan politik mereka adalah terciptanya sebuah kekhilafahan yang meliputi seluruh dunia Islam di bawah satu payung politik. Bagi HTI, khilafah adalah satu-satunya sistem politik yang sejalan dengan kehendak Syari'ah (Maarif, 2012: 36).

Salah seorang tokoh HTI, M. Shiddiq al-Jawi, dalam sebuah diskusi buku di PADMA (Padepokan Musa Asy'arie, Yogyakarta) beberapa waktu yang lalu, dengan nada optimis mengatakan bahwa kekhilafahan yang dibayangkan itu akan berdiri tahun 2020. Tidak dijelaskan bagaimana semuanya itu akan terjadi. Tokoh HTI yang lain, Farid Wajdi, ketika menyoroti demokrasi dengan prinsip kedaulatan rakyatnya, tegas-tegas mengatakan bahwa demokrasi itu sistem kufur (Maarif, 2012: 37)

“Sistem itu [demokrasi] bahkan bertentangan 100 persen dengan sistem Islam. Sistem ini tidak lain merupakan sistem kufur.” Menurut HTI, kekhilafahan juga sebagai realisasi negara Syari'ah. Oleh sebab itu formalisasi Syari'ah harus dilakukan oleh negara. Sedangkan dalam sebuah negara-bangsa, seperti Indonesia, cita-cita ke arah realisasi Syari'ah menjadi tidak mungkin. Dalam perspektif ini, bagi HTI, konsep-

negara bangsa itu "tidak lain hasil rekayasa penjajah yang kafir" (Maarif, 2012: 38).

Kesimpulan kita tentang HTI: sekalipun diembeli dengan perkataan Indonesia, organisasi ini jelas bercorak transnasional, dimana bangunan negara-negara bangsa harus dilebur. Bukankah angan-angan semacam ini tidak lain dari sebuah utopia mereka yang berusaha lari dari kenyataan? Tetapi kritik HTI terhadap praktik demokrasi di berbagai tempat, bukan substansinya yang menempatkan setiap warga pada posisi yang setara dalam sebuah negara, melainkan mengandung beberapa unsur kebenaran. Pertanyaannya adalah: mengapa HTI menutup mata terhadap praktik busuk "kekhilafahan" yang dipaksakan dalam berbagai periode sejarah Muslim? Bukankah sistem khilafah selama berabad-abad telah membunuh prinsip egalitarian yang diakui dalam demokrasi, yang begitu tegas dinyatakan dalam al-Qur'an? Pandangan yang ahistoris semacam inilah yang mengkhawatirkan: bahwa HTI berangan-angan menciptakan sebuah "imperialisme agama" pada skala global, yang menurut Shiddiq al-Jawi akan menjadi kenyataan pada tahun 2020, tinggal 11 tahun lagi dari sekarang (Maarif, 2012: 38).

Jika sikap mudah mengkafirkan orang-orang yang berlainan pendirian ini menyebar, maka sudah bisa dibayangkan bahwa yang akan terjadi adalah makin buyarnya suasana persaudaraan Muslim yang memang sudah lama rusak. Dengan kata lain, "Mereka memonopoli kebenaran, sebuah keangkuhan teologis yang muaranya satu: menghancurkan peradaban dengan memakai lensa kaca mata kuda!" Akhirnya untuk menutup bagian ini, kita kembali kepada PKS (Maarif, 2012: 38).

Dalam dokumen resmi partai disebutkan bahwa PKS tidak menolak demokrasi, pluralisme, dan nasionalisme Indonesia. Bahkan, menurut dokumen itu, dengan berpedoman kepada Piagam Madinah, PKS menerima kenyataan pluralitas agama dalam masyarakat Indonesia.

Lalu untuk meredam pengaruh gerakan radikalisme Islam, umat Islam perlu memiliki gerakan Islam politik dalam sistem demokrasi. Tentu yang dimaksud dengan gerakan Islam di sini adalah PKS sendiri. Sekalipun belum ada kupasan yang agak mendalam tentang pluralisme dan nasionalisme, PKS secara tertulis menerima kedua prinsip itu (Maarif, 2012: 39).

Persoalannya kemudian adalah: apakah penerimaan ini sebagai siasat politik sementara atau memang PKS telah menyesuaikan perjuangannya dengan realitas sosiologis masyarakat Indonesia?

Jawabannya tidak mungkin diberikan sekarang; kita masih harus menunggu sampai suatu ketika sekiranya PKS pegang kekuasaan dan telah membesar. Bila partai ini konsisten dengan apa yang dikatakan dalam dokumen resminya, maka corak Islamis yang menjadi ciri utama gerakan Ikhwan di negara-negara Arab dan di negara-negara lain telah mengalami perubahan orientasi mendasar di tangan PKS. Yang dimaksud dengan corak Islamis ialah suatu cita-cita politik untuk melaksanakan Syari'at Islam dalam sistem kenegaraan dengan mencantumkannya dalam konstitusi sebuah negara. Dengan kata lain, terciptanya sebuah negara Islam atau negara berdasarkan Islam, sebagaimana yang dulu pernah diperjuangkan oleh kekuatan politik Islam dalam Majelis Konstituante (1956-1959) di Indonesia. Posisi PKS belum terlalu jelas, apakah sudah menerima Pancasila sebagai sesuatu yang sudah final atau masih berfikir untuk alternatif yang lain (Maarif, 2012: 39).

Akhirnya Politik identitas dalam bentuk apa pun tidak akan membahayakan keutuhan bangsa dan negara ini di masa depan, selama cita-cita para pendiri bangsa tentang persatuan dan integrasi nasional, semangat Sumpah Pemuda yang telah melebur sentimen kesukuan, dan Pancasila sebagai dasar filosofi negara tidak dibiarkan tergantung di awang-awang, tetapi dihayati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kesungguhan dan tanggung jawab inilah

yang sering benar dimainkan oleh orang yang larut dalam pragmatism politik yang tuna-moral dan tuna-visi. Sikap semacam inilah yang menjadi musuh terbesar bagi Indonesia, dulu, sekarang, dan di masa datang (Maarif, 2012: 39).

C. Aktivitas Dakwah Kebangsaan Syafi'i Maarif di Indonesia

Dalam sebuah catatan pendeknya, Buya Syafi'i mempertegas suara hidupnya sebagai bapak bangsa: Aku mencintai bangsa ini secara tulus dan dalam sekali. Bagiku, membela bangsa adalah dalam rangka membela Islam. Usaha dan perjuangan Buya Syafi'i tak berhenti tatkala meletakkan kepemimpinan Muhammadiyah pada generasi di bawahnya. Buya kemudian mendirikan Maarif Institute sebagai wahana melanjutkan ikhtiar dalam rangka mengawal dan menggapai kebangkitan intelektual di kalangan generasi muda Islam. Kini, di bawah layar Maarif Institut, Buya Syafi'i pun kian menancapkokohkan jejaknya sebagai tokoh pluralis yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemajuan dakam bingkai keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan (muhammadiyah.com, 20 Juli 2018).

Kehadiran Syafi'i di pentas nasional juga bisa dikatakan memberi penyejukan di tengah-tengah kegelisahan rakyat. Ia tidak hanya menjadi motor penggerak kampanye moral antikorupsi, tetapi juga berdiri di baris terdepan dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Syafi'i juga kerap menjadi simbol atas berbagai usahanya merajut kasih dengan berbagai pimpinan lintas agama Syafi'i amat prihatin dengan moralitas kepemimpinan nasional serta politisi Indonesia dewasa ini.

Kata-kata dan perbuatan mereka masih dalam taraf perorangan dan pendidikan bangsa ini belum menghasilkan 'pemandu' melainkan koruptor dan 'penganggur' serta menghasilkan kepemimpinan yang 'rabun ayam', tunavisi ke depan. Para pemimpin sebagian besar termotivasi sekadar haus kekuasaan dan kesempatan untuk memperkaya diri dan diperparah dengan lembaga yang membantu pelestarian kekuasaannya. Akibatnya, bukannya keteladanan seorang pemimpin

dalam melaksanakan kebijakan dan menghindarkan kejahatan, tapi para pemimpin justru memberi contoh buruk bagaimana mengabaikan kebajikan (Koran Media Indonesia, Minggu, 1 Agustus 2010: 18).

Lebih lanjut menurut Solikin (2012: 202) Ahmad Syafii Maarif adalah seorang Intelektual Muslim yang menggunakan semangat moral Islam, dalam hal ini kalimat tersebut merupakan sebuah kesimpulan umum mengenai semua pemikiran Islam dari Ahmad Syafii Maarif. Dalam pandangan Ahmad Syafii Maarif Islam dapat dijadikan petunjuk moral bagi semua masyarakat Indonesia dalam membangun kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penjelasan ini merupakan sebuah hasil dari pergumulan Ahmad Syafii Maarif dengan sejarah, yang menjadi study-nya dan telah membuatnya dapat melakukan mobilitas yang sangat radikal dalam pemikiran Islam. Penempatan diri dari Buya Syafii dapat terus berubah-ubah sebagai sebuah hasil dari perkembangan pengetahuan hasil berdialog dengan sejarah, hal ini dapat kita lihat dari berubahnya seorang Ahmad Syafii Maarif dari seorang yang fundamentalis menjadi seorang Islam yang terbuka, atau dalam bahasa Buya Syafii sebagai Muslim yang inklusif dan pluralis. Selain itu dapat juga kita lihat bagaimana cita-cita yang awalnya menginginkan untuk terselenggaranya negara Islam nan megah menjadi seorang pembela demokrasi dan Pancasila sebagai sebuah ajaran moral bagi manusia Indonesia. Dalam bahasa singkatnya Ahmad Syafii Maarif dalam hal pemikiran negara dan agama mengalami transformasi pemikiran yang sangat kontras, dari syariat oriented pemikiran Moh. Natsir menjadi seorang sosial-demokrat yang menjadi orientasi dari Muhammad Hatta.

BAB IV

ANALISIS DAKWAH KEBANGSAAN

AHMAD SYAFI'I MAARIF DI INDONESIA

A. Analisis Pandangan Ahmad Syafi'i Maarif terkait Islam dan Negara

1. Negara Berkeadilan bukan Negara Islam

Menurutnya, gagasan negara Islam tidak memiliki basis religio-intelektual yang kukuh, yang berbicara secara teoretik. Terminologi negara Islam tidak ada dalam kepustakaan Islam klasik. Dalam Piagam Madinah pun, terminologi ini tidak ditemukan. Gagasan negara Islam (daulatul-islâmiyyah), menurutnya, merupakan fenomena abad ke-20. Kendati demikian, Islam sangat membutuhkan mesin negara untuk membumikan cita-cita dan ajaran-ajaran moral. Al-Qur'ân yang penuh dengan ajaran imperatif moral, lanjutnya, tidak diragukan lagi sangat membutuhkan negara sebagai institusi “pemaksa” bagi pelaksanaan perintah dan ajaran moralnya (Maarif dalam Asroni, 2011: 361).

Konsep negara dan pemerintahan merupakan suatu ijtihad yang merefleksikan adanya penjelajahan pemikiran spekulatif rasional dalam rangka mencari landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara serta pemerintahan sebagai sebuah faktor instrumental bagi pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan rakyat baik lahir maupun batin. Selain itu, perlu ditambahkan pula bahwa lahirnya ijtihad spekulatif tersebut didorong oleh suatu keinginan untuk mendapatkan landasan dalam rangka mempertahankan tatanan politik yang ada (Samsudin, 1993: 13).

Abū Hâmid al-Gazzālī dalam suatu karyanya yang berjudul *al-Iqtisād fī al-I'tiqād*, menegaskan bahwa antara kekuasaan politik dan agama mempunyai saling ketergantungan yang sangat erat. Sehubungan dengan persoalan ini al-Gazzālī menulis sebagai berikut:

“Agama merupakan dasar, dan sulṭân adalah penjaga-nya... sesungguhnya kekuasaan (sulṭân) itu hukumnya merupakan

keniscayaan (darûrî) bagi ketertiban dunia dan ketertiban dunia merupakan keniscayaan bagi ketertiban agama serta ketertiban agama merupakan keniscayaan bagi keberhasilan di akhirat. Hal itu merupakan tujuan yang sebenarnya dari para nabi. Oleh sebab itu, keharusan adanya imam merupakan salah satu bentuk keniscayaan agama yang tidak bisa diabaikan”.

Sesuai dengan ungkapan al-Gazzālî tersebut, dapat dipahami bahwa antara kekuasaan politik dan agama mempunyai saling ketergantungan yang sangat erat, di mana terciptanya iklim yang kondusif bagi agama tergantung kepada adanya stabilitas politik, karena sultân selaku pemegang kekuasaan politik merupakan penjaga agama, di mana dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agama merupakan dasar bagi semua.³ Oleh sebab itu, jika sultân yang mempunyai kewajiban untuk menjaga agama tersebut tidak dalam suasana stabil, maka akan berdampak kurang baik bagi suasana beragama di suatu negara.

Penekanan terhadap prinsip taat dalam keadaan baik dan buruk terhadap umat sebegitu kuatnya dalam teori politik Islam abad pertengahan. Faktor penekanan yang begitu kuat terhadap prinsip taat tersebut disinyalir menjadi faktor penentu bagi terhambatnya perkembangan proses syûrâ dalam pemikiran politik Islam, karena tidak didukung oleh suasana yang memungkinkan bagi terciptanya syûrâ di kalangan umat Islam (Sahri, 2013: 522).

Menurut Nurcholish Madjid, untuk semua tujuan sosial politik, manusia memang harus kembali kepada naturnya, yaitu fitrah manusia yang suci (hanif). Dan dari sini pula Nurcholish Madjid membangun dasar teologis mengenai Islam sebagai agama kemanusiaan yang nantinya akan mendasari gagasan-gagasan politik Islam, berdasarkan teoritisasi al-Quran, yang sekaligus menjadi inti pemikiran keagamaan Nurcholish yang mendasari segi-segi pemikiran politiknya.

Oleh karena itu, penting di sini untuk mengutip lengkap nuktah-nuktah pandangan dasar kemanusiaan Islam, seperti yang telah dirumuskan oleh Nurcholish Madjid, dan selalu menjadi dasar ceramah-

ceramah maupun tulisan-tulisannya, baik mengenai agama Islam maupun politik sebagaimana berikut: “(1) Manusia diikat dalam suatu perjanjian primordial dengan Tuhan, yaitu bahwa manusia, sejak dari kehidupannya dalam alam ruhani, berjanji untuk mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pusat orientasi hidupnya; (2) Hasilnya ialah kelahiran manusia dalam kesucian asal (fitrah), dan diasumsikan ia akan tumbuh dalam kesucian itu jika seandainya tidak ada pengaruh lingkungan; (3) Kesucian asal itu bersemayam dalam hati nurani (nurani, artinya bersifat cahaya terang), yang mendorongnya untuk senantiasa mencari, berpihak dan berbuat yang baik dan benar; (4) Tetapi karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah (antara lain, berpandangan pendek, cenderung tertarik kepada hal-hal yang bersifat segera), maka setiap pribadinya mempunyai potensi untuk salah, karena “tergoda” oleh hal-hal menarik dalam jangka pendek; (5) Maka, untuk hidupnya, manusia dibekali dengan akal pikiran, kemudian agama, dan terbebani kewajiban terus menerus mencari dan memilih jalan hidup yang lurus, benar dan baik; (6) jadi manusia adalah makhluk etis dan moral, dalam arti bahwa perbuatan baik buruknya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik di dunia ini sesama manusia, maupun di akhirat di hadapan Tuhan Yang Maha Esa; (7) Berbeda dengan pertanggungjawaban di dunia yang nisbi sehingga masih ada kemungkinan manusia menghindarinya, pertanggungjawaban di akhirat adalah mutlak, dan sama sekali tidak mungkin dihindari. Selain itu, pertanggungjawaban mutlak kepada Tuhan di akhirat itu bersifat sangat pribadi, sehingga tidak ada pembelaan, hubungan solidaritas dan perkawinan, sekalipun sesama antara teman, karib kerabat, anak dan ibu-bapak; (8) Semuanya itu mengasumsikan bahwa setiap pribadi manusia, dalam hidupnya di dunia ini, mempunyai hak dasar untuk memilih dan menentukan sendiri perilaku moral dan etisnya (tanpa hak memilih itu tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral dan etis, dan manusia akan sama derajat dengan makhluk yang lain, jadi tidak akan mengalami kebahagiaan

sejati); (9) Karena hakekat dasar yang mulia itu, manusia dinyatakan sebagai puncak segala makhluk Allah, yang diciptakan olehnya dalam sebaik-baik ciptaan, yang menurut asalnya berharkat dan martabat setinggi-tingginya; (10) Karena Allah pun memuliakan anak cucu Adam ini, dan melindungi serta menanggungnya di daratan maupun di lautan; (11) setiap pribadi manusia adalah berharga, seharga kemanusiaan sejagad. Maka barangsiapa merugikan seorang pribadi, seperti membunuhnya, tanpa alasan yang sah maka ia bagaikan merugikan seluruh umat manusia, dan barangsiapa berbuat baik kepada seseorang, seperti menolong hidupnya, maka ia bagaikan berbuat baik kepada seluruh umat manusia.; (12) Oleh karena itu setiap pribadi manusia harus berbuat baik kepada sesamanya, dengan memenuhi kewajiban diri pribadi terhadap pribadi yang lain, dan dengan menghormati hak-hak orang lain, dalam suatu jalinan hubungan kemasyarakatan yang damai dan terbuka”(Nirwana AN, 2013: 42).

Negara Islam menurut Nurcholish Madjid tidak dikenal dalam sejarah. Buktinya ketika Nabi dimakamkan tiga hari setelah meninggal. Kejadian itu, menurut Nurcholish Madjid disebabkan karena penggantinya tidak jelas pula, pola suksesi tidak jelas, dan itu menunjukkan bahwa masalah kenegaraan tidak menjadi bagian integral dari Islam, demikian Nurcholis Madjid menarik kesimpulan. Menurut Nurcholish, ditinjau dari segi proses sejarah dan perkembangan pemikiran, timbulnya gagasan “Negara Islam” itu adalah suatu bentuk kecenderungan apologetis. Setidaknya, menurut Nurcholish, apologetis tersebut dapat ditinjau dari dua segi: Pertama, kemunculannya adalah apologi terhadap ideologi-ideologi Barat seperti demokrasi, sosialisme, komunisme dan lain sebagainya. Invasi kultural berupa ideologi-ideologi tersebut direspon dalam apresiasi yang bersifat ideologi politis, yang melahirkan pandangan dan berujung pada perjuangan Islam politik yang mencita-citakan terbentuknya “negara Islam”, sebagaimana terdapat

negara demokrasi, negara sosialis, negara komunis, dan lain sebagainya (Nirwana AN, 2013: 44).

Kedua, pandangan legalisme sebagai kelanjutan fikihisme yang begitu dominan di kalangan umat Islam, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan sistem hukum yang mengatur pemerintahan dan negara pada masa lalu. Pemahaman yang demikian masih kuat mengiringi wacana politik Islam modern, yang mengasumsikan bahwa untuk menegakkan sebuah syari'at maka haruslah dimulai dari negara sebagai elemen kekuasaan yang akan mampu mengatur dan menegakkannya (Nirwana AN, 2013: 44-45).

2. Pancasila Dasar Negara

Menguraikan hubungan antara agama dan negara bukanlah pekerjaan yang mudah. Jalinan hubungannya telah memancing perdebatan yang sangat dinamis dalam ketatanegaraan Indonesia. Pokok soal yang sering diperdebatkan adalah keberadaan posisi agama dalam hubungan dengan negara, dalam hal ini termasuk keberadaan hukum agama (hukum Islam) dalam tata hukum Indonesia. Sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan sejarah, perdebatan tersebut telah dimulai sejak awal kemerdekaan, pada masa pembentukan negara bangsa, tatkala para pendiri negara kita (*the founding fathers and mathers*) dihadapkan pada persoalan prinsipil, yakni di atas dasar apa negara Indonesia didirikan dan dioperasikan kelak.

Dalam hal ini terdapat dua kutub pandangan yang berbeda secara diametral, yaitu negara yang harus berdasarkan agama (Islam) dan negara yang berdasarkan nasionalisme sekuler. Perdebatan itu dianggap selesai ketika disepakati rumusan Jakarta Charter (Piagam Jakarta 22 Juni 1945). Kemudian kompromi yang dianggap sementara, dilakukan ketika pengesahan UUD pada 18 Agustus 1945 dari Piagam Jakarta, yaitu yang menghapuskan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kesepakatan ini menyimpan bara perdebatan pada masa selanjutnya. Karena kesepakatan pada 18 Agustus 1945 itu

dianggap sebagai kesepakatan sementara agar tidak menghambat Indonesia yang baru sehari merdeka (Zoelva, 2012: 100).

Pancasila memegang peranan penting dalam mempersatukan berbagai macam latar belakang di Indonesia. Meskipun harus diakui bahwa hingga saat ini ada saja sekelompok warga negara Indonesia yang masih menolak Pancasila dengan alasan tidak sesuai dengan Islam. Penolakan ini tampaknya disebabkan oleh paradigma dan cara pandang yang berbeda. Islam adalah agama, dan Pancasila adalah sebuah ideologi. Sebagai ideologi, Pancasila merupakan objektivikasi dari Islam, yakni unsur-unsur objektif agama ada dalam Pancasila. Nilai-nilai universal Islam secara eksplisit menjiwai muatan Pancasila yang berprinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan (Sulaiman, 2015: 134).

Secara historis, dialektika agama dan negara sebenarnya sudah berlangsung lama, jauh sebelum kolonialisasi mengakar di Indonesia. Dalam hal ini, Islam telah berakar dalam kesadaran hukum masyarakat dan mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia.

Ketika Belanda sampai di Nusantara sekitar abad 16-17 Masehi, mereka menemukan beberapa kerajaan besar atau kecil yang tersebar di berbagai pelosok nusantara telah memberlakukan hukum Islam dan corak pemerintahan Islam. Intinya, secara politik raja-raja di nusantara memberlakukan hukum Islam meski tidak dalam konteks peraturan atau perundang-undangan kerajaan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, hukum Islam kian berada dalam posisi yang tidak pasti dan terpinggirkan, karena terdorong oleh kepentingan kolonialisme pada saat itu. Sejak rezim kolonial Belanda menguasai kepulauan Indonesia seutuhnya, politik hukum pun berubah secara sistematis. Pemerintah kolonial Belanda berupaya melakukan pembatasan keberlakuan hukum Islam yang antara lain didasarkan pada teori resepsi³ yang digagas Snouck Hurgronje dengan pemberlakuan Staatsblad 1937 no. 1164 Lemahnya

posisi hukum Islam ini terus terjadi hingga menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda pada tahun 1942 (Zoelva, 2012: 101).

Demikian halnya pada masa pendudukan Jepang. Meski tidak ada perubahan berarti bagi posisi agama, Islam, selama masa ini, namun dapat dikatakan lebih baik dari rezim sebelumnya, karena beberapa badan atau komite bentukan Jepang seperti BPUPKI, duduk tokoh-tokoh yang mewakili kelompok Islam. Ada kehendak Jepang merangkul umat Islam untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Masa Indonesia merdeka adalah saat paling penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, dengan semangat membawa perubahan nilai-nilai revolusioner dalam tata hukum di Indonesia, termasuk perjuangan para tokohnya dalam menjadikan hukum Islam sebagai dasar tata hukum Indonesia (Zoelva, 2012: 101).

Ketika UUD 1945 akan disahkan, dialektika mengenai relasi agama dan negara menjadi awal perdebatan yang menguras energi. Waktu itu ada perbedaan pandangan yang cukup tajam diantara para founding fathers yaitu, antara faksi Islam dan faksi nasionalis dalam sidang BPUPKI. Faksi Islam menghendaki negara berdasar Islam, sedangkan faksi nasionalis menginginkan negara yang tidak berdasarkan agama (Zoelva, 2012: 101).

Faksi Islam berprinsip bahwa agama, dalam hal ini Islam, tidak dapat dipisahkan dari urusan kenegaraan, karena agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan saja, melainkan juga hubungan sesama manusia, lingkungan dan alam semesta. Sedangkan faksi nasionalis berprinsip bahwa agama dan negara harus dipisahkan secara tegas dan proporsional, dengan keyakinan bahwa fungsi agama hanya mengurus ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kehidupan akhirat dan urusan pribadi saja, sementara negara memang merupakan masalah politik yang berurusan dengan duniawi (Zoelva, 2012: 101).

Sekalipun proses perdebatan mengenai pilihan dasar negara sangat keras, perdebatan itu berakhir pada suatu titik kompromi atau kesepakatan

(*consensus*) yang dituangkan dalam Piagam Jakarta yang dimaksudkan sebagai rancangan Pembukaan UUD, tanggal 22 Juni 1945. Prinsipnya, piagam ini merupakan *gentleman's agreement* atau *social contract* dari wakil-wakil yang ada dalam forum penyusunan UUD tersebut (Zoelva, 2012: 102).

Formulasi resmi pertama Pancasila terdapat dalam Piagam Jakarta, yang sila pertamanya adalah “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syar’iat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Konsekuensinya, kalimat tersebut juga dicantumkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dan adanya ketentuan yang mengharuskan Presiden orang Indonesia asli dan beragama Islam. Di sini, nampak kedudukan hukum Islam disebutkan secara eksplisit dan mempunyai posisi yang kuat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) (Zoelva, 2012: 102).

Ini berbeda dengan masa sebelumnya. Pada zaman Belanda, hukum Islam secara sistematis direduksi dengan diberlakukannya hukum adat bagi golongan bumi putera dan hukum barat bagi golongan Eropa. Politik hukum tersebut didasarkan pada teori resepsi atau teori konflik Snouck Hourgronje sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Sehingga menurut Hazairin, (dalam Zoelva, 2012: 102) adalah reaksi yang wajar dari pihak Islam untuk merehabilitasi hidup keagamaannya melalui “tujuh kata” di Piagam Jakarta. Namun, kompromi yang tertuang dalam Piagam Jakarta itu diformulasikan kembali pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, dengan alasan kekhawatiran kalangan rakyat Indonesia Timur terhadap kandungan yang ada dalam Piagam Jakarta. Alhasil, “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta dihilangkan menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

A. Hamid S. Attamimi (dalam 136) menyatakan bahwa kelima sila dari Pancasila dalam kedudukannya sebagai cita hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara positif merupakan “bintang pemandu” yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan yang memberi isi pada tiap-tiap peraturan perundang-undangan, dan secara negatif merupakan kerangka

untuk membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan tersebut. Terhadap isi peraturan perundang-undangan, sila-sila tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan merupakan asas hukum umum.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara sekaligus sebagai cita hukum merupakan sumber dan dasar serta pedoman bagi peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Jika demikian halnya, maka Pancasila dalam tatanan hukum di Indonesia memiliki 2 (dua) dimensi, yaitu (1) sebagai norma kritik, yakni menjadi batu uji bagi norma-norma di bawahnya, dan (2) sebagai bintang pemandu, yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum di bawahnya. Atau yang secara padat dinyatakan Muladi bahwa Pancasila merupakan instrumen dari “*Margin of Appreciation doctrine*”, yang dalam hal ini Pancasila menjadi acuan parameter bagi penerapan “*Margin of Appreciation Doctrine*” (136).

Moh. Mahfud MD (dalam Anis, 2010: 136) menegaskan bahwa Pancasila yang rumusannya terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD Tahun 1945 adalah *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia. Pancasila sangat cocok dengan realitas bangsa Indonesia yang plural. Dengan Pancasila akan menjadi “ruang” bagi bertemunya kompromi berbagai kepentingan yang semula mungkin saling bertentangan secara diametral. Kesejarahan bangsa Indonesia selama ini tampak selalu gagal untuk menemukan ideologi baru selain Pancasila dalam kerangka untuk menyatukan relitas bangsa yang pluralistik.

Jadi, kata kuncinya utamanya adalah Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia adalah sebagai dasar sekaligus sebagai ideologi. Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang Pancasila sebagai ideologi, pada kesempatan ini layak kiranya jika dibuka-buka kembali ingatan tentang apa itu yang dinamakan ideologi. Uraian secara singkat tentang makna ideologi itu diperlukan agar terdapat kesamaan pandangan tentang apa yang dimaksud dengan ideologi itu (Anis, 2010: 137).

Sejak diperkenalkan Destutt de Tracy tahun 1796, istilah ideologi mengalami perkembangan dalam makna semantisnya. Semula ideologi mengandung arti sebagai science of ideas, yang merupakan makna etimologis. Dalam perkembangannya, ideologi berarti cara berpikir tertentu, yang berbeda dengan cara berpikir ilmiah maupun filosofis. Pada perkembangannya, ideologi tumbuh menjadi sistem keyakinan (belief system) yang sangat berbeda dengan arti semula sebagai science ideas. Ideologi sebagai sistem keyakinan dengan segala kepentingannya tersebut akhirnya menjadi sistem normatif, yang karenanya sering disebut dengan doktrin, ajaran perjuangan yang berdasar pada pandangan hidup atau filsafah hidup (Anis, 2010: 137). Franz Magnis-Suseno (dalam Anis, 2010: 137) secara padat mengartikan ideologi sebagai “kepercayaan mengenai bagaimana manusia harus hidup dan bagaimana masyarakat seharusnya diatur”.

3. Menolak Politik Identitas

Politik identitas mendapat tempat yang istimewa beberapa tahun terakhir. Dalam studi pasca-kolonial politik identitas sudah lama digeluti. Pemikir seperti Ania Loomba, Homi K. Bhabha dan Gayatri C Spivak adalah nama-nama yang biasa dirujuk. Mereka dirujuk karena sumbangsihnya dalam meletakkan politik identitas sebagai ciptaan dalam wacana sejarah dan budaya. Sementara dalam literatur ilmu politik, politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik (political identity) dengan politik identitas (political of identity). Political identity merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan political of identity mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik (Muhtar, 2012: 119).

Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dan kian mengemuka dalam praktek politik sehari-hari.

Karena itu para ilmuwan yang bergelut dalam wacana politik identitas berusaha sekuat mungkin untuk mencoba menafsirkan kembali dalam logika yang sangat sederhana dan lebih operasional. Misalnya saja Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama (Muhtar, 2012: 120).

Sedangkan Donald L Morowitz (1998), pakar politik dari Universitas Duke, mendefinisikan: Politik identitas adalah memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen (Muhtar, 2012: 120).

Baik Agnes Heller maupun Donald L Morowitz memperlihatkan sebuah benang merah yang sama yakni politik identitas dimaknai sebagai politik perbedaan. Konsep ini juga mewarnai hasil Simposium Asosiasi Politik Internasional di Wina pada 1994. Kesan yang lain dari pertemuan Wina adalah lahirnya dasar-dasar praktik politik identitas. Sementara Kemala Chandakirana (1989) dalam artikelnya Geertz dan Masalah Kesukuan, menyebutkan bahwa: Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi—alat untuk menggalang politik—guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya” (Muhtar, 2012: 120).

Secara praktis politik identitas akan memunculkan konformisasi mayoritas. Hal ini tentu akan berujung pada penindasan terhadap para imigran, etnis, minoritas agama, dan kelompok-kelompok kolektif yang dianggap menyimpang dari standar “normal” masyarakat. Sebab, “kesatuan” (unity) sering disalahartikan sebagai “keseragaman”

(uniformity) dan pengejawantahan “kesamaan” (equality) bisa berarti “keserbasamaan” (homogeneity).

Dalam konteks sebuah negara demokratis, penyeragaman menampilkan ketidakadilan mayoritas dalam mengakomodasi perbedaan yang ada. Hal ini menjadi pemicu bangkitnya politik identitas dalam pembicaraan tentang kewarganegaraan. Tuntutan politik identitas menggambarkan tugas yang perlu dihadapi sebuah negara demokratis yang multikultural. Tugas ini secara gamblang secara demikian: pengakuan aspirasi kelompok-kelompok minoritas penting untuk masyarakat demokratis dan pluralis, demi penjagaan otensitas kelompok-kelompok itu yang nilainya tak sama dengan kelompok yang lain. Bahaya besarnya adalah jika pengakuan perbedaan yang diikuti perlakuan yang berbeda itu menjadi diskriminasi (beritasatu.com, diakses pada 12 Juli 2018).

Lebih lanjut agama, suku dan ras adalah identitas primordial yang berpotensi merusak kebhinekaan jika digunakan untuk menggiring kepentingan politik kelompok. Agama digunakan untuk menyisipkan pesan politik yang terdengar ‘sakral’ agar para pemilih tak berpaling ke pihak yang beragama lain yang mereka sebut kafir. Tuduhan kafir adalah penistaan yang sebenarnya, melampaui kewenangan Tuhan Sang Maha Agung.

Lalu, pihak-pihak yang berkepentingan, yang mengkampanyekan klaim-klaim kelompok identitas, membuat rumusan: asalkan ada hubungan darah keluarga dan sedarah adalah sebuah syarat mutlak untuk menetapkan pilihan. Isu klaim-klaim kelompok identitas ini jelas berbahaya, karena amat rentan untuk saling dibenturkan. Mereka yang senang dengan gorengan identitas ini dengan mudah disulut emosinya demi menjaga kenyamanan kepentingan kelompoknya. Mereka lupa bahwa identitas kelompok itu adalah takdir. Warna kulit dan rambut keriting adalah takdir. Agama yang mereka anut adalah apa yang ibu

mereka ajarkan, yang lalu tercatat dalam KTP (Salim dalam Qureta.com, diakses pada 12 Juli 2018).

Jika target agitasi tak memiliki hubungan keluarga dengan calon, maka mereka akan dicocokkan lagi riwayat leluhurnya untuk kemudian dikelompokkan ke dalam etnis tertentu. Identifikasi ini masih sangat manjur untuk menggiring pemilih untuk menentukan pilihannya. Akhirnya, akan mengerucut pada isu pribumi dan non-pribumi, seperti yang sukses diperankan oleh penjajah Belanda dalam skema *divide et impera* (politik adu domba). Polarisasi isu pribumi dan non-pribumi juga tak bisa dianggap angin lalu. Memori kita masih segar mengingat kerusuhan yang menelan korban jiwa tak terperiikan di hari-hari jelang runtuhnya rezim Orde Baru. Isu non-pribumi dikoar-koarkan untuk menyerang mereka yang berkulit putih dan bermata sipit, identitas yang kini sering disebut dengan istilah 'aseng' (Salim dalam Qureta.com, diakses pada 12 Juli 2018).

Padahal, jika masyarakat peduli literasi dan diberikan informasi yang proporsional, akan menemukan jejak-jejak pribumi yang tak hanya dimiliki oleh satu suku atau ras saja. Deretan pejuang kemerdekaan nasional lahir dari identitas yang berbeda-beda. Jika tetap ngotot dengan sentimen pribumi, maka sesuai sejarah, kita akan kembali ke era homo erectus sejuta tahun silam. Jika benturan identitas primordial ini terus-menerus dibiarkan, maka demokrasi kita tak ubahnya rimba belantara, yang kuat yang akan menerkam yang lemah, dan yang banyak yang akan berkuasa. Menggoreng isu primordial dalam Pilkada sama halnya mengadu seekor domba dengan serigala lapar, atau membiarkan seekor anak ayam sekandang dengan ular piton. Mengerikan (Salim dalam Qureta.com, diakses pada 12 Juli 2018).

Disinilah perlu dalam konteks sebuah negara demokratis sekaligus plural: prinsip kewarganegaraan yang setara, yang menganggap semua orang dan kelompok masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam suatu masyarakat pluralis, yang diharapkan serius mengakui dan

menjaga perbedaan, pertanyaannya adalah bagaimana mengelola keragaman, bagaimana mengakui perbedaan, dan pada saat yang sama mengupayakan kesetaraan.

B. Analisis Dakwah Kebangsaan Syafi'i Maarif di Indonesia

Ahmad Syafii Maarif adalah seorang Intelektual Muslim yang menggunakan semangat moral Islam sebagai dasar berpijak dari seluruh pemikiran politiknya. Pola hubungan antara negara dan agama tergambar dalam pola yang saling memerlukan, Negara memerlukan agama sebagai sumber prinsip moral-transendental bagi tegaknya keadilan dan prinsip persamaan dalam sebuah negara, sedangkan Agama butuh negara sebagai institusi pelindung bagi terlaksananya ajaran moral agama dapat terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal pemikiran negara dan agama ia juga mengalami transformasi pemikiran yang sangat kontras, dari syariat oriented pemikiran Moh. Natsir sebelum menjadi seorang sosial-demokrat yang menjadi orientasi dari Muhammad Hatta. Titik kontras pemikirannya adalah sebelum Chicago dan pasca Chicago (Solikin, 2012: 194).

Hal ini karena pasca dari Chicago ia dipengaruhi oleh model-model pendekatan Neo-Modernisme Islamnya Fazlur Rahman. Dan seperti yang dijelaskan oleh Rahman sendiri bahwa gerakan pembaharuannya bertumpu pada pertama, perumusan pandangan dunia al-Quran. Kedua, menciptakan suatu analisis yang sistematis terhadap ajaran-ajaran moral al-Quran dan pada gilirannya akan tercipta etika al-Quran. Ketiga, merumuskan sistem dan formula hukum yang selaras dengan kebutuhan kontemporer berdasarkan etika tersebut. Arah gerakan Rahman ini mengambil bentuknya pada hipotesanya tentang arus kebangkitan Islam yang menyebar di dunia yang muncul sebagai reaksi yang kuat terhadap kelemahan ulama tradisional dan kegagalan negara Islam dalam menanggulangi pengaruh Barat. Singkatnya, model berpikir neo-modernisme Islam ala Rahman, seperti yang secara kritis diilustrasikan juga oleh Farid Essack dalam bukunya *Qur'an, Liberation & Pluralism* (Damanhuri, 2015: 79).

Sementara itu ketika sudah mengubah haluan dakwahnya, otomatis ia kini dihadapkan dengan mereka yang ‘ngotot’ ingin mendirikan negara Islam dan sudah pasti menolak demokrasi. Keinginan sebagian kalangan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara sesungguhnya bukanlah fenomena yang baru. Ia telah mencuat sejak Indonesia masih berumur belasan bulan, tepatnya ketika penentuan dasar negara. Akan tetapi, tuntutan yang didendangkan kelompok Islam tersebut kandas di tengah jalan lantaran mendapatkan resistensi dari kelompok nasionalis. “Kekalahan diplomatis” tersebut tidak menyurutkan sebagian kalangan Muslim untuk terus memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dan memformalisasikan Syariat Islam hingga detik ini, baik lewat jalur parlemen maupun gerakan di luar parlemen sebagaimana yang telah dilakukan oleh berbagai kelompok Islam radikal seperti FPI, MMI, FUI, dan lain-lain selama ini.

Fenomena menguatnya wacana negara Islam dan formalisasi Syariat Islam di Indonesia merupakan suatu fenomena sosio-politik-keagamaan yang menggembirakan sekaligus problematis. Membanggakan lantaran menguatnya wacana negara Islam dan formalisasi Syariat Islam menandakan bahwa sebagian umat Islam Indonesia sedang mengalami kegairahan dalam beragama (Islam). Problematis dikarenakan wacana negara Islam dan formalisasi Syariat Islam akan mengancam keutuhan (baca: disintegrasi) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berideologi Pancasila dan berdasar UUD 1945. Alasannya, Pancasila yang telah didaulat menjadi ideologi negara sejak berdirinya nation state bernama Indonesia yang diproklamasikan *the founding fathers*, Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 akan terancam eksistensinya lantaran munculnya wacana negara Islam dan formalisasi Syariat Islam ditengarai hanya akan berujung pada pembabatan pluralitas bangsa, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan pengebirian nilai-nilai demokrasin (Asroni, 2012: 358).

Dalam posisi ini Syafii Maarif terus saja maju dan meski terkadang harus berbenturan dengan sesama muslim, bahkan sesama pengikut Muhammadiyah sekalipun. Ia dalam kapasitasnya sebagai tokoh bangsa berusaha sekuat

mungkin untuk tetap teguh dalam haluan “dakwah kebangsaan” yang sudah dengan sadar ia pilih dan geluti. Konsistensi pun ditunjukkannya sebagai bukti dari keseriusan dari pilihannya, dan menjadi garda terdepan untuk menyelaraskan antara agama dan bangsa dalam konsensus yang telah disepakati bersama melalui Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

C. Aktualisasi Dakwah Kebangsaan di Era Saat ini (Perspektif Paradigma Dakwah)

Dakwah kebangsaan merupakan istilah yang belum banyak disebut atau bahkan secara defenitif belum begitu banyak dikaji. Istilah dakwah kebangsaan sendiri muncul sebagai jawaban atas realitas umat Islam Indonesia yang mulai menemukan benih-benih benalu bagi bangsa ini untuk mencoba mengganti sistem yang sudah berlaku dan prinsip dalam sejarah panjang NKRI.

Munculnya fenomena menguatnya kembali gerakan ataupun ideologi anti-NKRI dan Pancasila, bahkan kemudian mendorong Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI untuk mendiskusikan metode dakwah kebangsaan yang efektif, dengan tema “Metode Dakwah Kebangsaan: Harmoni antara Agama dan Negara” pada Rabu (17/5/2017) di Gedung MUI Pusat (dikutip dari Tribunnews.com, diakses pada tanggal 5 Agustus 2018).

Dalam diskusi yang dipimpin oleh KH. Cholil Nafis tersebut hanya menyimpulkan bahwa menjaga marwah Negara dengan mempertahankan Pancasila dan NKRI merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Dengan kata lain secara konseptual dan defenitif sekali lagi Dakwah Kebangsaan belum ada perumusan mulai dari metoda yang sistematis dalam kerangka ilmu dakwah. Meski begitu, ketika melihat secara faktual, terlebih setelah mengkaji Dakwah Kebangsaan Ahmad Syafii Maarif, maka disimpulkan terdapat dua aktualisasi Dakwah Kebangsaan di Indonesia, diantaranya seperti berikut:

a. Dakwah Kebangsaan dalam Bentuk Strategi Dakwah Kultural

Dakwah kultural merupakan paradigma dakwah yang berangkat dari turunan dari penafsiran Islam yang bercorak kultural dan dinamis-dialogis. Penafsiran teologis ini menawarkan pemikiran yang objektif untuk membaca dan memaknai teks dan tradisi keagamaan. Sehingga Islam sebagai agama universal terbuka kontekstualkan dengan budaya lokal tanpa perlu takut kehilangan orisinalitasnya (Ilyas dan Hotman, 2011: 243). Pada prinsipnya, dakwah kultural meyakini bahwa agama akan selalu bertahan dan dianut oleh pengikutnya apabila secara antropologis, sosiologis dan psikologis mampu memenuhi kebutuhan manusia. Di samping itu selain merupakan doktrin, ia harus mampu mengakomodir faktor-faktor kultural dalam upaya pemberian konsepsional sosio-historisnya (Anas, 2006: 88). Pendekatan budaya juga dianggap sebagai salah satu watak dasar Islam sebagai agama perdamaian. Kedamaian termaksud bukanlah sesuatu yang bersifat statis, tetapi mesti diikuti dengan sikap-sikap kritis dan proaktif dalam ranah kompetisi sehat untuk mencapai kehidupan lebih baik. Konteks ajaran Islam, mengakui eksistensi konten berdaya lokal misalnya dapat dilihat dalam kaidah ushul fiqh yang berbunyi “adat itu dikuatkan (dihukumkan)” (*al-‘adat muhakkamah*) (Aripudin, 2012: 25).

Dalam konteks Indonesia –khususnya memasuki era kebangkitan nasional- maka dakwah kultural selalu diidentikan dengan organisasi Nahdhatul Ulama. Ahmad Syafii Maarif sendiri juga menyebut NU sebagai salah satu sayap besar umat Islam di Indonesia bersama Muhammadiyah berada di garda terdepan menjaga keutuhan NKRI. Lebih dari itu, Ormas Islam terbesar di Indonesia ini juga dikenal sebagai wadah kaum tradisional yang notabene memiliki kultur yang kuat dalam segi kepatuhan pada Ulama berikut juga dalam praktik keagamaan dan kebangsaan. Oleh karenanya tidak salah jika kultur yang ada dalam tubuh NU, sejalan dengan Ahmad Syafii Maarif dalam segi aktualisasi Dakwah Kebangsaan di Indonesia

b. Dakwah Kebangsaan dalam Bentuk Strategi Dakwah Struktural

Strategi dakwah struktural adalah proses dakwah yang dilakukan dengan memasukkan rumus kebijakan dan aktifitas dakwah secara terstruktur. Artinya, para pelaku dakwah adalah orang atau lembaga yang secara struktural mempunyai posisi sebagai *decision maker* dan *policy maker* dalam sebuah lembaga atau organisasi, termasuk lembaga pemerintah (Halim, 2002: 53). Dakwah struktural cenderung lebih bersifat politis melalui pengembangan hukum dan perundang-undangan (Mulkan, 2010: 250).

Dakwah struktural yang memiliki kecenderungan pada aspek politik juga pernah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. Jika ditilik pada perjalanan hidup Rasulullah Saw. maka dapat dilihat bahwa Rasulullah sendiri telah mewujudkan prinsip-prinsip politik bahkan ketika masih di Mekah. Saat berada muncul keputusan untuk hijrah, maka secara konsep hal tersebut merupakan wujud tindakan usaha untuk menyempurnakan kekuatan agama dan kemenangan politik (Hamid, 2001: 13).

Artinya, dakwah struktural dalam dunia Islam bukanlah merupakan barang baru. Keberadaannya bahkan menjadi sangat penting karena dakwah struktural akan bisa mencakup kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Dalam konteks Dakwah Kebangsaan, strategi dakwah struktural hampir dilakukan oleh semua ormas, bahkan secara faktual pendirian ormas itu sendiri merupakan wujud nyata dari dakwah struktural. Meski begitu, ketika menyentuh pada aspek memperjuangkan NKRI, Muhammadiyah merupakan contoh paling riil dari dakwah struktural, sebab di Indonesia Muhammadiyah lah yang memiliki roda Organisasi paling teratur. Tentunya dengan tanpa mengabaikan ormas-ormas lain yang juga telah berkecimpung secara struktural untuk memperjuangkan NKRI.

Tapi memang tidak berlebihan jika menyebut Muhammadiyah sebagai pemain utama dalam dakwah struktural, sebab sejak awal kemerdekaan

ormas ini sudah terlihat mengirinkan wakil-wakilnya dalam menegakkan pilar kebangsaan di Negeri ini. Sebut saja Presiden Soekarno, Hakma, Jendarl Soedirman, Ki Bagus Hadikusumo dan sebagainya. Semuanya merupakan wujud nyata strategi dakwah struktural yang mereka terapkan. Tidak terkecuali Ahmad Syafii Maarif, yang pernah menjabat sebagai ketua PP Muhammadiyah. Kendati tidak aktif dalam pergerakan politik, namun ia mampu masuk dan menegaskan perannya dalam upaya mempertegas komitmennya untuk tetap menjaga NKRI dan Pancasila dari rong-rongan sebagian anak bangsa yang ingin merubah dasar dan sistem Negara, apapun itu dalilnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dipaparkan seperti di atas, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ahmad Syafii Maarif dalam melakukan dakwah kebangsaan di dasari dengan tiga hal, yakni berpijak pada konsep negara berkeadilan bukan negara Islam, mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, serta menolak dengan keras politik identitas.
2. Aktivitas dakwah kebangsaan Ahmad Syafii Maarif di Indonesia berdasar pada hidupnya sebagai bapak bangsa, sebagai tokoh pluralis yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemajuan dalam bingkai keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan, ia sebagai intelektual muslim yang merasa memiliki tanggungjawab untuk memperjuangkan Islam moderat di Indonesia.
3. Dakwah kebangsaan Ahmad Syafii Maarif di Indonesia sangat relevan untuk kondisi umat Islam saat ini. Dengan model kontekstualisasi ajaran Islam menuju kepada konsepsi riil (kontekstual) memecahkan problematika umat yang kian hari kian kompleks mulai dari problematika pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya bahkan sekarang dengan terbukanya ekspresi keberagaman.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait dakwah kebangsaan Ahmad Syafii Maarif, penulis tentu menemukan beberapa kendala terkait dengan karya-karya beliau yang sebenarnya begitu banyak. Oleh karenanya mengingat begitu besarnya aktivitas dan pemikiran Ahmad Syafii Maarif dalam dunia dakwah, maka menjadi penting bagi lembaga-lembaga

pendidikan khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo turut memfasilitasi pengadaan berbagai literatur yang merupakan karya beliau. Selain itu studi khusus tentang pemikiran para tokoh sekaliber Ahmad Syafii Maarif perlu rasanya untuk dijadikan materi dalam perkuliahan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Awa'iy, Taufik Yusuf. 2011. *Fiqh Dakwah Ilallah*. Jakarta: Al-I'tishom.
- Ali, Mohamad, 2016. *Pemikiran Pendidikan Islam Ahmad Syafii Maarif*. Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 17, No. 2, Desember 2016.
- Anas, Ahmad, 2006. *Paradigma Dakwah Kontemporer, Aplikasi Teoritis dan Praktis Dakwah sebagai Solusi Problematika Kekinian*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ariadi, Hamitan, 2010. *Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif Mengenai Demokrasi di Indonesia*. Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.
- Ariadi, Hamithan, 2010. Skripsi: *Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif Mengenai Demokrasi di Indonesia*. Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syariah IAIN Antasari: Banjarmasin.
- Arikunto, Suharsimi, 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rhineka Cipta: Yogyakarta.
- Aripudin, Acep, 2012. *Dakwah Antar Budaya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 25.
- Arrohmawati, Fajrul Amalia, 2017. *Pemikiran Pendidikan Pluralisme Keagamaan Ahmad Syafii Maarif*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arrohmawati, Fajrul Amalia, 2017. Skripsi: *Pemikiran Pendidikan Pluralisme Keagamaan Ahmad Syafii Maarif*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah: Surakarta.
- Asroni, Ahmad, 2011. *Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Tentang Negara Dan Syariat Islam Di Indonesia*. Millah Vol. X, No 2, Februari 2011.
- Baso, Ahmad, 2006. *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam & Fundamentalisme neo-Liberal*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Bawailhi, 2013. *Fazlur Rahman dan Pembaharuan Metodologi Tafsir Alquran* Jurnal Media Akademika, Vol. 28, No. 1, Januari 2013.
- Damanhuri, 2015. *Islam, Keindonesiaan, Dan Kemanusiaan (Telaah Pemikiran Ahmad Syafii Maarif)*. Al-Banjari, Vol. 14, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Damanhuri, 2015. *Islam, Keindonesiaan, dan Kemanusiaan (Telaah Pemikiran Ahmad Syafii Maarif)*. Jurnal Al-Banjari Vol. 14, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Damanhuri, 2015. *Islam, Keindonesiaan, dan Kemanusiaan (Telaah Pemikiran Ahmad Syafii Maarif)*. Jurnal Al-Banjari Vol. 14, No. 1, Januari-Juni 2015.

- Danim, Sudarwan, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia: Bandung.
- Farih, Amin, 2016. *Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. Jurnal Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Volume. 24 Nomor. 2 November 2016.
- Furchan, Arief dan Maimun, Agus, 2005. *Studi Tokoh, Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Haboddin, Muhtar, 2012. *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*. Jurnal Studi Pemerintahan Vol.3 No.1 Februari 2012.
- Halim, A., 2002. *Strategi Dakwah yang Terabaikan*. Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 5, No. 1 April 2002.
- Hamid, Tijadi Abd. Qadir, 2001. *Pemikiran Politik dalam Al-Qur'an*. Gema Insani Press: Jakarta.
- Harahap, Syahrin, 2011. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hidayat, Amri Syarif, 2013. *Membangun Dimensi Baru Dakwah Islam Dari Dakwah Tekstual Menuju Dakwah Kontekstual*. Jurnal RISALAH Vol. XXIV, Edisi 2, November 2013.
- Ibrahim, Anis, 2010. PERSPEKTIF FUTURISTIK PANCASILA SEBAGAI ASAS/IDEOLOGI DALAM UU KEORMASAN. Jurnal Konstitusi, Vol. III, No. 2, November 2010.
- Ismail, Ilyas dan Hotman, Prio, 2011. *Filsafat Dakwah "Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasdi, Aminuddin, 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa Press.
- Llobera, Josep R., 1998. *Recent Theories of Nasionalism*. University College London & Diputicao de Barcelona: Barcelona.
- Loso, SH, 2014. *Urgensi Memperkuat Semangat Kebangsaan dalam Upaya Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 2014.
- Lubis, Erni Sari Dwi Devi dan Jamuin, Maarif. 2015. *Infiltarsi Pemikiran dan Pergerakan HTI di Indonesia*. Jurnal Suhuf, Vol 27 No. 2 November 2015.
- M. Din Syamsudin, 1993. "Usaha Pendirian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam Ulum al-Qur'an, Nomor 2, Vol IV, (Jakarta, LSAF: 1993).
- Maarif, Ahmad Syafi'i, 1997. *Islam Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- _____, 2009. *Titik-Titik Kisar di Perjalanaku: Autobiografi Ahmad Syafii Maarif*. Bandung: PT. Mizan Pustaka bekerjasama dengan Maarif Institute.
- _____, 2012. *Percakapan Dengan Ahmad Syafii Maarif, Membela Kebebasan Beragama*. E-book.pdf .
- _____, 2012. *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project.
- _____, dkk, 2009. *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transansional di Indonesia*. Diterbitkan atas kerjasama Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institute dan Maarif Institute: Jakarta.
- Mahifal, 2014. *Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan*, Jurnal Pedagogia FKIP-Unpak.
- Moesa, Ali Maschan, 2007. *Nasionalisme Kyai, Kontruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKiS,
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cet. 30, PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mulkan, Abdul Munir, 2010. *Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan Kyai Ahmad Dahlan*. PT. Kompas Media Nusantara: Jakarta.
- Mustaqim, Abdul, 2014. *Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)*. Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis Vol. 15, No. 2, Juli 2014.
- Nirwana AN, Andri, 2013. *Konsep Islamic State Amien Rais Dan Nurcholish Madjid*. Jurnal Substantia Vol. 15, No. 1, April 2013.
- PP Muhammadiyah, 2015. *Muhammadiyah Dan Isu-Isu Strategis Keumatan, Kebangsaan, Dan Kemanusiaan Universal*. Disampaikan pada Muktamar Muhammadiyah Ke-47 Makassar 16-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M.
- Purnomo, Aloys Budi, 2007. *Rakyat Bukan Tumbal*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Qodir, Zulqi, 2010. *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rahmat, Jalaluddin, 2004. *Dakwah Sufistik Kang Jalal*. Jakarta: Kelompok Paramadina.
- Sahri, 2013. *Konsep Negara dan Pemerintahan dalam Perspektif Fikih Siyash Al-Gazzali*. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 47, No. 2, Desember 2013.
- Saputra, Wahidin. 2011. *Pengantar Ilmu Dakwah*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Setiyowati, Tutik, 2013. Skripsi: Konsep Pluralisme K.H. Abdurrahman Wahid untuk Pengembangan Dakwah Islam di Indonesia (Studi Analisis Terhadap Buku ISLAMKU Islam Anda Islam Kita). Fakultas Dakwah IAIN Walisongo: Semarang.
- Sholikin, Ahmad, 2012. *Pemikiran Politik Negara Dan Agama "Ahmad Syafii Maarif"*. Jurnal Politik Muda, Vol 2 No.1, Januari-Maret 2012.
- Solikin, Ahmad, 2012. *Pemikiran Politik Negara Dan Agama "Ahmad Syafii Maarif"*. Jurnal Politik Muda, Vol 2 No.1, Januari-Maret 2012.
- Solikin, Ahmad, 2012. *Pemikiran Politik Negara Dan Agama Ahmad Syafii Maarif*. Jurnal Politik Muda, Vol 2 No.1, Januari-Maret 2012.
- Suhady, Idup dan Sinaga, A.M., 2006. *Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Sulaiman, 2015. *Membaca Pancasila: Perspektif Kearifan Sufi Jala>l al-Di>n Ru>mi>*. Ibd. Jurnal Kebudayaan Islam. Vol. 13, No. 1, Januari - Juni 2015.
- Supriyatna, Nana, 2016. *Sejarah Indonesia*. Gravindo Media Pratama: Jakarta.
- Surakhmad, Winarno, 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Ulum, Miftahul, 2012. *Tradisi Dakwah Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia*, ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php.
- Widayati, Heni Wahyu, 2009. *Dialog Pemikiran tentang Islam dan Negara di Indonesia Masa Awal Kemerdekaan* (Jurnal Dakwah, Vol. X No. 2, Juli-Desember 2009), 220.
- Zoelva, Hamdan, 2012. *Relasi islam, negara, dan pancasila dalam perspektif tata hukum indonesia*. de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012.

Koran Media Indonesia

www.beritasatu.com

www.hasanuddinali.com.

www.kompas.com

www.kumparan.com

www.muhammadiyah.com

www.quireta.com

www.tribunnews.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Science Nidaus Salam
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 02 Mei 1993
Alamat : Jl. Ahmad Yai 54 Jajag Gambiran Banyuwangi
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Email : sciencenida0205@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD 2 Jajag Banyuwangi
2. SMP Darus Sholah Jember
3. SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember

Semarang, 20 Juli 2018

Ahmad Science Nidaus Salam